



BADAN POM



K S H M

2023

LAPORAN TAHUNAN

**BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**



@birokerjasamahumas.bpom



kerjasama.pom.go.id



@biroksmbpom

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Tahunan ini merupakan bagian integral dari komitmen kami untuk transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

Laporan Tahunan ini menjadi cerminan dan refleksi komprehensif atas upaya serta pencapaian Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM dalam mendukung visi dan misi BPOM melalui hubungan kerja sama yang kuat, produktif, dan saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan.

Tahun 2023, memberikan tantangan dan peluang baru seiring dengan semakin kompleksnya dinamika global yang menuntut peningkatan peran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam memperkuat kerja sama BPOM dan meningkatkan interaksi bermakna dengan masyarakat. Publikasi kinerja dalam laporan tahunan ini memuat strategi, upaya, dan inisiasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat serta capaian kinerja dan dampak hasil kegiatan yang mencerminkan kolaboratif BPOM bersama dengan para mitra, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan berbagai program strategis dan secara konsisten melakukan perbaikan terus-menerus di berbagai bidang, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini merupakan komitmen dan

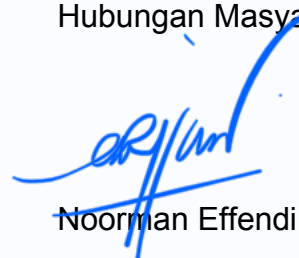
upaya nyata dalam penerapan reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju *good governance* dan *clean government*.

Kami percaya bahwa transparansi pertanggungjawaban kegiatan adalah kunci untuk membangun kepercayaan, dan melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan komitmen Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagai instansi pemerintah dan Aparatur Sipil Negara dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. Laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan program kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional Pemerintah Indonesia.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas laporan kegiatan tahunan yang akan datang agar lebih baik dan bermanfaat.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sepanjang Tahun 2023. Dengan dukungan, kolaborasi, dan inspirasi dari para pemangku kepentingan dan tim internal, memungkinkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Jakarta, 28 Februari 2024
Kepala Biro Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat,



Noorman Effendi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR TABEL | vi |
| HIGHLIGHT KEGIATAN | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 37 |
| 1.1. Gambaran Umum Instansi | 37 |
| 1.1.1. Visi dan Misi | 37 |
| 1.1.2. Tujuan | 37 |
| 1.1.3. Tugas dan Fungsi | 38 |
| 1.1.4. Budaya Organisasi | 38 |
| 1.1.5. Struktur Organisasi | 41 |
| 1.2. Peta Strategi, Sasaran dan Indikator | 41 |
| BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA | 45 |
| 2.1. Sumber Daya Manusia | 45 |
| 2.1.1. Data Kepegawaian | 45 |
| 2.1.2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) | 48 |
| 2.1.3. Peningkatan Kompetensi SDM | 49 |
| 2.2. Sarana dan Prasarana | 50 |
| 2.3. Anggaran | 51 |
| BAB III HASIL KEGIATAN BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 53 |
| 3.1 Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global | 53 |
| 3.1.1 IKK 1: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan | 53 |
| 3.1.2. IKK 2: Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral | 60 |
| 3.2 Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas | 73 |
| 3.2.1 IKK 3: Indeks kepuasan media | 73 |
| 3.2.3 IKK 4: Indeks Opini Publik | 76 |
| 3.2.3 IKK 5: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | 78 |
| 3.3 Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM | 80 |

| | |
|--|------------|
| 3.4 Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional | 83 |
| 3.5 Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas..... | 85 |
| 3.5.1. IKK 8: Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | 86 |
| 3.5.2. IKK 9: Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | 89 |
| 3.5.3. IKK 10: Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai <i>agenda setting</i> .. | 91 |
| 3.6 Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal..... | 92 |
| 3.7 Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal..... | 98 |
| 3.7.1. IKK 12: Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas | 99 |
| 3.8 Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas | 102 |
| 3.8.1 IKK 13: Indeks pengelolaan data dan informasi..... | 102 |
| 3.9 Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel..... | 103 |
| 3.9.1. IKK 14: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas | 103 |
| BAB IV PENUTUP..... | 105 |
| 4.1. Kesimpulan | 105 |
| 4.2. Saran..... | 105 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Core Value BERAKHLAK..... | 39 |
| Gambar 2. Budaya Kerja PIKKIR | 40 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | 41 |
| Gambar 4. Peta Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | 42 |
| Gambar 5. Usia Pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | 46 |
| Gambar 6. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan | 47 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat..... | 42 |
| <i>Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....</i> | <i>45</i> |
| Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja | 48 |
| Tabel 4. Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 50 |
| Tabel 5. Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 | 51 |

HIGHLIGHT KEGIATAN

FEBRUARI

Persembahan Simfoni Untukmu Indonesia



BPOM menggelar kegiatan Unjuk Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan “Persembahan Simfoni Untukmu Indonesia” di Ciputra Artpreneur Theater, 15 Februari 2023. Dalam acara tersebut dilakukan Launching Inovasi Kinerja BPOM, Pemberian Apresiasi Kepada Stakeholder dan Internal BPOM, Unjuk Kinerja BPOM 3 Tahun Masa Pandemi, Expo UMKM Nusantara, Expo Sistem

Pengawasan Life Cycle Produk Obat dan Makanan, dan Simfoni Untukmu Indonesia.

Kunjungan Kerja ke Canberra dan Sydney, Australia



Australia merupakan salah satu mitra utama Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik. Kedekatan geografis serta keunggulan dan daya saing Australia memberikan banyak peluang kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, antara lain terkait peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan.

Dalam kaitan ini, BPOM telah melaksanakan pertemuan dengan regulator mitra di Australia untuk membahas keberlanjutan kerja sama perkuatan regulatori di bidang obat. Selain itu, BPOM juga telah menjajaki kolaborasi dalam peningkatan kapasitas SDM melalui program beasiswa serta pelatihan.

Kunjungan kerja ke Australia pada tanggal 19-22 Februari 2022, dilakukan dalam rangka partisipasi pada Indo-Pacific Regulatory Strengthening Program (RSP) Regulatory Practice Workshop di Canberra. *Workshop* diselenggarakan oleh *Therapeutics Goods Administration* (TGA) selaku otoritas regulator obat Australia, dan diikuti oleh otoritas

regulator obat negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Pada Pembukaan *Workshop*, BPOM berbagi pengalaman terkait penanganan kasus cemaran etilen dan dietilen glikol (EG/DEG) pada sirup obat untuk anak di Indonesia. *Sharing* informasi ini diharapkan dapat mencegah hal serupa terjadi di negara lain di masa mendatang.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan BPOM untuk melakukan pertemuan bilateral dengan TGA guna membahas keberlanjutan kerja sama antara BPOM dengan TGA di bawah kerangka RSP. Pertemuan juga membahas rencana kerja sama ke depan, antara lain area prioritas untuk peningkatan kapasitas BPOM yang memerlukan dukungan TGA, serta harapan agar kolaborasi ke depan juga dapat mencakup *complementary medicines*, untuk meningkatkan daya saing obat tradisional Indonesia di pasar global.



Di Canberra, BPOM juga melakukan pertemuan dengan tim *Australia Awards* yang berada di bawah *Australian Department of Foreign Affairs and Trade*, untuk berdiskusi mengenai dukungan beasiswa program *short course* dan pendidikan lanjutan (Master dan Doktoral) dalam rangka peningkatan kompetensi bagi pegawai BPOM.

Pada kesempatan ini, pihak *Australia Awards* menyampaikan beberapa mekanisme beasiswa yang dapat dimanfaatkan BPOM, antara lain *fellowship program*, *short course*, dan *Split-Site Masters Program*.

Selanjutnya, di Sydney BPOM melakukan pertemuan dengan Centre for Continuing Education (CCE), the University of Sydney, untuk menjajaki penyelenggaraan *tailor-made training* untuk peningkatan kapasitas BPOM di bidang perencanaan dan penganggaran. Pihak CCE menyampaikan opsi-opsi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan BPOM, untuk selanjutnya dapat ditetapkan prioritas pelatihan, dengan opsi pelaksanaan secara luring maupun daring.

Sebagai tindak lanjut beberapa pertemuan tersebut, BPOM akan melakukan pembahasan lanjutan dengan TGA terkait mekanisme perpanjangan kerja sama, serta akan melanjutkan pembahasan peningkatan kapasitas pada masing-masing area prioritas yang telah disampaikan kepada TGA.

BPOM juga akan menindaklanjuti pertemuan dengan tim *Australia Awards* dengan menjajaki usulan program *fellowship*, *short course*, dan/atau *Split-Site Masters Program*. Dengan Centre for Continuing Education, the University of Sydney, BPOM akan berkomunikasi lebih lanjut untuk menyusun prioritas pelatihan dan menjajaki pengaturan pelaksanaan pelatihan.

MARET

B POM meraih *Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023*

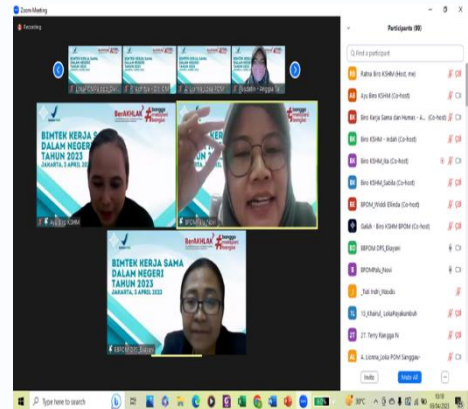
Pada ajang *The 8th Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2023* tanggal 17 Maret 2023 di Denpasar, Bali, B POM mendapat penghargaan PRIA 2023 dalam Kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online selama tahun 2022. Kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online dinilai berdasarkan total dan sentimen pemberitaan (*exposure*) di lebih dari 250 media cetak dan 11.000 media online selama rentang waktu 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022.



APRIL

Bimbingan Teknis Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2023

Pada tanggal 3 April 2023, Biro Kerja Sama dan Humas mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota Tim Pengelola Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2023 dari Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Pada bimtek ini dipaparkan mengenai perkembangan kerja sama dalam negeri BPOM serta kegiatan sosialisasi mengenai Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri, Penilaian Efektivitas Kerja Sama Dalam Negeri UPT, dan penggunaan Sistem Informasi Kerja Sama (SIKES).



Kunjungan Kerja ke Arab Saudi

Arab Saudi merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia dalam hal ini BPOM bahkan telah memiliki kerja sama bilateral dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan otoritas regulator terkait obat dan makanan di Arab Saudi yaitu Saudi FDA.



Pada kunjungan kerja ke Arab Saudi pada tanggal 4-8 April 2023, BPOM sebagai *Competent Authority* ekspor pangan mengandung hewan Indonesia ke Arab Saudi memimpin pertemuan antara Pemerintah RI dengan Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Arab Saudi, yaitu Saudi FDA

(SFDA) untuk membahas kemudahan akses (*ease of access*) pangan mengandung hewan dari Indonesia bagi konsumsi para jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi. Delegasi Pemerintah RI terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Luar Negeri, BPOM dan didampingi Duta Besar RI Riyadh.

Pada pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong perkembangan perdagangan kedua negara untuk produk Obat dan dan Makanan secara luas, tidak hanya untuk keperluan haji dan umroh namun untuk pasar kedua negara. Untuk itu, SFDA akan segera menjadwalkan *on-site inspection* terhadap Unit Pengolahan Ikan produk perikanan Indonesia untuk mempercepat proses perizinan ekspor ke Arab Saudi.

BPOM juga turut mengusulkan pembentukan Kesepakatan Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*) di bidang keamanan pangan antara kedua lembaga. *On-site Inspection* SFDA ke sarana pangan Indonesia akan menjadi dasar terhadap diberlakukannya *mutual recognition*, sehingga untuk ekspor pangan kedepannya SFDA tidak perlu melakukan *on-site inspection* kembali namun cukup dilakukan oleh BPOM sebagai *Competent Authority* dalam melakukan inspeksi kepada sarana produksi pangan Indonesia.

Berkaitan pelarangan impor (*import ban*) sementara untuk daging unggas, telur, dan produk turunannya dari Indonesia, SFDA mengkonfirmasi dapat mengangkat pelarangan (*ban*) tersebut jika Indonesia telah memperbaharui status bebas AI kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) berdasarkan status bebas AI *by zonasi* atau *by city*.

Lebih lanjut, SFDA mengkonfirmasi bahwa sudah tidak terdapat pelarangan impor daging ruminansia dan produk olahannya dari Indonesia ke Arab Saudi, namun harus berasal dari sarana/*establishment* yang telah diregistrasi oleh SFDA.



Kedua pihak juga sepakat untuk melanjutkan kerja sama dan memperpanjang MoU antara BPOM dan SFDA. Dalam kaitan ini, SFDA mengapresiasi kekuatan BPOM dalam pengawasan vaksin dan produk biologi dan mengusulkan kolaborasi berkelanjutan dalam

bidang pelatihan laboratorium obat dan vaksin yang akan diberikan oleh BPOM kepada SFDA. BPOM juga berjanji akan mendampingi SFDA terhadap proses keanggotaan SFDA untuk bergabung dalam *Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S).

Penerbitan Majalah POM “22 Tahun Kinerja BPOM untuk Negeri”

Pada Triwulan 2 tahun 2023, telah diterbitkan Majalah POM (MaPOM) Vol.5/No.1/2023 pada 15 Mei 2023. Edisi kali ini mengusung tema utama 22 Tahun Kinerja BPOM Untuk Negeri.

Sebanyak 22 artikel yang tersebar dalam rubrik Ruang Utama, Ruang Belajar, Ruang Tamu, Ruang Kerja, Jendela, Bingkai, dan Dapur UMKM. Selain itu, terdapat tujuh infografis edukasi obat dan makanan dan satu komik kiprah BPOM di masa pandemi COVID-19. MaPOM hadir dalam bentuk digital dapat diakses melalui

https://bit.ly/MaPOM_Vol5_No1_2023_2 untuk menampilkan visual yang lebih interaktif.



Dialog Publik RUU Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM hadir sebagai salah satu narasumber pada seminar nasional yang bertajuk “Inovasi Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan”. Digelar secara *hybrid*, seminar ini diselenggarakan dua kali, yaitu tanggal 5 April 2023 di Universitas Jenderal Achmad Yani dan tanggal 13 April 2023 di Universitas Airlangga, serta diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah dan berbagai latar belakang berbeda, mulai dari akademisi, mahasiswa, praktisi, asosiasi, *stakeholder* hingga media.



MEI

Workshop Peningkatan Jaminan Kualitas Obat di Regional Asia Tenggara



B POM bersama *World Health Organization (WHO) South-East Asia Regional Office (SEARO)* menyelenggarakan “*Regional Workshop on Ensuring Quality of Medicines from Contaminated Substances*” selama 2 (dua) hari pada tanggal 2 s.d. 4 Mei 2024 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas regulatori serta meningkatkan kesetaraan akses terhadap obat aman, berkhasiat, dan bermutu bagi negara-negara di

kawasan Asia Tenggara dan Selatan.

Dalam rangka mendukung pemanfaatan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan mutu produk obat di seluruh negara anggota SEAR, *workshop* ini juga membahas isu terkait pentingnya sistem pengawasan obat mulai dari fungsi regulatori sistem, fungsi penilaian dan perizinan obat, fungsi inspeksi, fungsi pengujian obat, serta pengawasan produk di pasaran, termasuk produk yang dijual di berbagai jalur peredaran, seperti penjualan secara *online*.



Penunjukan Indonesia sebagai Tuan Rumah kegiatan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi WHO SEARO kepada B POM yang telah melakukan langkah-langkah cepat, responsif, efektif, dan transparan serta memiliki komitmen dan *strong leadership* dalam penanganan kasus produk obat substandar.

Asistensi Pengelolaan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat di Balai POM di Bengkulu



Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan asistensi pengelolaan kerja sama dan hubungan masyarakat di Balai POM di Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2023. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait kerja sama dan kehumasan dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Balai POM di Bengkulu dan Loka POM di Rejang Lebong, pengelola kerja sama dalam negeri, serta tim bidang informasi komunikasi. Materi yang disampaikan, antara lain mengenai pengelolaan kerja sama dan kehumasan termasuk pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama (SIKES), *Export Consultation Desk* (ECD), dan dokumentasi pada pengawasan Obat dan Makanan berupa fotografi dan videografi.



Simposium dan Seminar *Risk Management Plan* (RMP) ke-2

BPOM, *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency* (PMDA-Jepang), dan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, didukung oleh *ASEAN Secretariat* dengan pendanaan dari *Japan-ASEAN Integration Fund* (JAIF) bekerja sama dalam mengadakan *ASEAN-Japan Risk Management Plan (RMP) Symposium and Seminar* pada 24-26 Mei 2023 di Jakarta. *Project* tersebut merupakan lanjutan dari kerjasama antara PMDA dan *Pharmaceutical Product Working Group* (PPWG) di bawah kerangka *the ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality* (ACCSQ).



Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas regulator di ASEAN menuju harmonisasi di kawasan Asia Tenggara terkait *Risk Management Plan* (RMP). Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antara regulator, industri obat, dan akademisi, khususnya dalam pemastian keamanan obat melalui implementasi RMP.

JUNI

The 1st Indonesia Government Public Relations (GPR) Awards 2023



B POM mengukir prestasi sebagai pemenang pada ajang The 1st Indonesia Government Public Relations (GPR) Awards 2023 (IGA 2023) yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia pada Jumat (16/06/2023). B POM raih penghargaan Gold Winner untuk kategori Lembaga Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Terbaik pada Sub Kategori Lembaga Pemerintah Pusat/Negara dengan presentasi yang berjudul “Ekosistem Komunikasi yang Positif dan Transparan: Mengawal Peradaban Bangsa, Menjaga Nusantara”.

Meet The Expert Volume 1

Untuk meningkatkan kapasitas tim pelaksana media sosial dalam melakukan pengelolaan media sosial di lingkungan B POM, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melaksanakan kegiatan Meet The Expert. Kegiatan ini merupakan forum pertemuan seluruh anggota tim pelaksana media sosial B POM dengan narasumber yang ahli di bidangnya. *Meet The Expert Vol 1* yang dilaksanakan pada 27 Juni 2024 menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan *insight* tentang pentingnya etika hukum dan menghargai hak atas kekayaan intelektual dalam publikasi melalui media sosial pemerintah.





MoU BPOM dan AIFAESA I.P. Republik Demokratik Timor-Leste

BPOM melaksanakan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Badan Inspeksi dan Pengawasan Kegiatan Ekonomi, Sanitasi, dan Pangan atau *Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, Institusi Publik* (AIFAESA I.P.) Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) tentang Kerja Sama Teknik di Bidang Pengawasan Pangan pada Rabu, 21 Juni 2023 di Kantor BPOM, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito dan Inspektur Jenderal AIFAESA, I.P., Ernesto Monteiro.

Pembentukan MoU ini bertujuan untuk semakin memperkuat jaminan keamanan pangan yang dibangun oleh kedua negara, yaitu Indonesia dan RDTL. MoU tersebut mencakup (1) pengembangan sistem pengawasan pangan; (2) pertukaran informasi tentang kebijakan dan strategi pengawasan pangan; (3) penyediaan bantuan dalam melakukan penilaian dan merumuskan kebijakan nasional serta pengawasan di bidang pangan; (4) pengembangan sumber daya manusia di AIFAESA I.P., dan (5) penguatan koordinasi pengawasan pangan di perbatasan antara kedua negara.



Kerja sama BPOM dengan AIFAESA I.P., RDTL telah dimulai tahun 2018 melalui Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) di bidang pengawasan pangan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang efektif bagi inspektur pangan, juga berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai sistem manajemen laboratorium dan instrumen dengan AIFAESA, I.P. melalui *benchmarking*, pertukaran *best practice*, pendampingan, dan pelatihan dalam pengujian.

MoU ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah RI dalam pemberian hibah peralatan laboratorium kepada Pemerintah RDTL dengan anggaran Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). BPOM juga berkomitmen untuk terus

membantu memperkuat sistem pengawasan pangan di RDTL serta menjadikan BPOM sebagai mitra terpercaya bagi AIFAESA, I.P.

Dukungan BPOM pada Penyelenggaraan Ibadah Haji



Dalam rangka perlindungan kesehatan jamaah haji melalui penyediaan Obat dan Makanan aman, bermutu dan bekhasia/bermanfaat BPOM memberikan dukungan Pengawasan Obat dan Makanan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H mulai tanggal 11 Juni s.d. 10 Juli 2023. Sebanyak 5 (lima) orang SDM BPOM ditugaskan sebagai Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Pengawasan Obat dan Makanan (PPIH POM) dalam

koordinasi Kementerian Agama.

Selama penugasan, PPIH POM melakukan kunjungan/pemeriksaan dapur dalam rangka pengawasan pangan yang dilakukan bersama dengan tim Seksi Layanan Konsumsi atau tim Sanitarian maupun secara mandiri. Pemeriksaan sarana katering dilakukan di 21 dapur katering pada Daerah Kerja Madinah yang melayani distribusi ke 94 hotel jamaah, 54 dapur katering pada Daerah Kerja Makkah yang melayani distribusi ke 108 hotel yang tersebar di 5 wilayah yaitu Mahbas Jin, Syisyah, Raudhah, Jarwal, dan Misfalah.

Melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian ini, pelaku usaha dapur katering diharapkan mampu menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang menyeluruh dan dapat beradaptasi sesuai dengan perkembangan terkini.



JULI

Penyelenggaraan WHO-SEARN Assembly



Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *World Health Organization South-East Asia Regulatory Network (WHO-SEARN) Assembly*, pada tanggal 24–27 Juli 2023. BPOM, bersama dengan Kementerian Kesehatan, secara aktif berpartisipasi pada forum SEARN dan mendukung penuh penyelenggaraan *SEARN Assembly*,

dimana pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan tertinggi dan strategis oleh jejaring regulator berdasarkan konsensus anggota SEARN. Pertemuan ini mengadopsi *output draft strategy workplan* yang dibahas pada *working group and steering group*.

SEARN Assembly tahun 2023, dihadiri oleh WHO dan 5 (lima) Kepala Otoritas Regulator Obat dari 11 negara anggota dan perwakilan dari Indonesia, India, Thailand, Maldives, serta Bangladesh, sebagai anggota *Steering Group*, Ketua *Working Group*. Pertemuan tahun ini mengangkat tema *Regulatory Collaboration for Harnessing Assured Medical Product Access*, dengan beberapa poin penting pembahasan adalah pentingnya kolaborasi antar-otoritas regulator obat dalam melakukan pengawalan mutu obat, pengembangan dan penegakan standar, serta pengawasan obat dan produk medis lainnya.



Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, dalam sambutannya menjelaskan bahwa sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini, kerja sama dan kolaborasi antara otoritas regulator obat negara anggota SEARN dapat menjawab tantangan dalam hal pengawasan obat, terutama terkait akses terhadap obat-obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Upaya kolektif SEARN dalam memperkuat sistem regulasi dan mempromosikan lanskap regulasi yang harmonis di kawasan ini akan membuka jalan bagi kelancaran pergerakan produk obat lintas batas.

Pada pertemuan ini, Indonesia secara khusus menyampaikan paparan mengenai *regulatory oversight on vaccine*. BPOM sebagai otoritas regulator obat Indonesia telah memperoleh pengakuan dalam WHO *benchmarking tool* dengan tingkat kematangan/maturitas (*maturity level*) 3 dari 4 untuk semua fungsi, dan mendapat nilai 4 untuk fungsi izin edar (*marketing authorization*), *vigilance* akses laboratorium, dan fungsi *lot release*.

Pengakuan yang diterima oleh BPOM sebagai otoritas regulator obat ini, memungkinkan vaksin yang diproduksi Indonesia dapat berkontribusi pada pasokan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu untuk pasar global.

Workshop “Optimalisasi Sinergisitas BPOM dengan Mitra dalam Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan”

Untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas kerja sama dengan mitra di daerah, telah dilaksanakan Workshop Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama dengan tema “Optimalisasi Sinergisitas Badan POM dengan Mitra dalam Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan” dengan mitra di Provinsi Lampung tanggal 24 Juli 2023.



Workshop dihadiri oleh 21 mitra kerja sama BBPOM di Bandar Lampung dan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, terdiri dari: Bappeda Kota Metro; Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu; Dinas Kesehatan-Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; Dinas Kesehatan-Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Dinas Pangan-Pemerintah Kota Bandar Lampung; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; BNN Provinsi Lampung; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; Universitas Lampung; Akademi Farmasi Cendikia Farma Husada; Universitas Malahayati; Universitas Tulang Bawang; Universitas Mitra Indonesia; Politeknik Kesehatan Kesuma Bangsa; Institut Teknologi Sumatera; Kwarda Gerakan Pramuka Lampung; Kwartir Cabang Kabupaten Pramuka Tulang Bawang; Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah (PW) Salimah Lampung; dan KPID Provinsi Lampung.

Sebagai tindak lanjut workshop, akan disusun forum komunikasi antar koordinator kerja sama BBPOM di Bandarlampung dengan seluruh mitra kerja samanya; penyelenggaraan bimtek bagi mitra kerja sama terkait program pengawasan Obat dan Makanan; serta pemberdayaan generasi muda agar meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Workshop Informasi dan Komunikasi (*WIKOM*) Camp



Pada 5-7 Juli 2023, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM menyelenggarakan Workshop Informasi dan Komunikasi (*WIKOM*) Camp di Bekasi. Kegiatan diikuti oleh 135 peserta yang terdiri dari perwakilan dari seluruh unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis/UPT (Balai Besar/Balai/Loka POM). Dalam *workshop*

tersebut, peserta mendapatkan materi tentang Memanfaatkan Media Sosial Untuk Berkomunikasi (Helmy Yahya - Tim R66 Media); Aspek Hukum Hak Cipta Pada Media Sosial (Agung Damarsasongko - Kementerian Hukum dan HAM); Visual Bercerita (Humas BPOM); Menulis Berita Itu Mudah (Humas BPOM); dan Konten Media Sosial (Humas BPOM).



Meet The Expert Vol. 4

Pada 28 Juli 2027 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat kembali melaksanakan kegiatan Meet the Expert Vol. 4 untuk peningkatan kapasitas bagi tim pelaksana media sosial BPOM dengan menghadirkan narasumber pakar komunikasi digital yang bertujuan meningkatkan wawasan tentang pemanfaatan teknologi khususnya *artificial intelligence* dalam pengelolaan media sosial di lingkungan BPOM.

KSST BPOM untuk PPB Kenya



BPOM telah menyelenggarakan Program *Learning Visit* bagi 1 (satu) orang regulator dari Pharmacy and Poisons Board (PPB) Kenya dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) selama 4 (empat) hari pada tanggal 10 – 13 Juli 2023, yang difasilitasi oleh US Agency for International Development (USAID) The Medicines, Technologies, and Pharmaceutical Services (MTaPS) Indonesia.

Learning visit ini diharapkan bermanfaat bagi PPB Kenya dalam pemenuhan fungsi regulatori sesuai WHO GBT *assessment*. Kunjungan langsung PPB Kenya ke industri farmasi akan membantu pihak Kenya melihat implementasi fungsi regulasi BPOM yang tengah berjalan.

Video Kinerja Apel Siaga Integritas



Pengawasan obat dan makanan yang kian kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM, sehingga diperlukan integritas tinggi jajaran BPOM. Video apel siaga integritas ini mengingatkan kembali dinamika yang mewarnai setiap perjalanan membuat BPOM semakin tangguh.

Video ditayangkan pada kegiatan Apel Siaga Integritas yang dilaksanakan pada 31 Juli 2023 dan dihadiri oleh seluruh jajaran BPOM dari tingkat pusat maupun Balai Besar/Balai/Loka POM, baik secara *offline* maupun *online*.

KERJA Sama BPOM dengan TNI AL



Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPOM dan TNI AL tentang Optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Maritim merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara BPOM dan TNI. Penandatanganan PKS ini dilakukan secara *desk to desk* oleh Kepala BPOM, Penny K. Lukito di Kantor BPOM bersama dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI, Muhammad Ali di Markas Besar Angkatan Laut pada tanggal 4 Juli 2023.

Kerja sama ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan kegiatan peningkatan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah maritim. Kepala BPOM berharap kolaborasi dan kerja sama ini dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan terutama di wilayah maritim serta memberantas masuknya Obat dan Makanan ilegal melalui jalur laut.



“Melalui kerja sama dan kolaborasi dengan TNI AL ini diharapkan dapat meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat untuk melindungi kesehatan masyarakat serta meningkatkan perekonomian Indonesia yang pada akhirnya dapat memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Kepala BPOM.

AGUSTUS

Penandatanganan MoU BPOM dengan Universitas Sriwijaya



BPOM dan Universitas Sriwijaya (Unsri) telah memperbarui kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Obat dan Makanan pada tanggal 8 Agustus 2023 di Auditorium Unsri Kampus

Indralaya, Palembang, Sumatera Selatan.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); meningkatkan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keamanan, mutu, dan khasiat Obat dan Makanan; dan meningkatkan keamanan, mutu, dan daya saing produk Obat dan Makanan. Selanjutnya, MoU tersebut akan diimplementasikan melalui sinergi dan kolaborasi program kegiatan nyata dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti Pangan Aman Goes to Campus (PAGC), Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), program pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat, pendampingan inkubator bisnis civitas akademika Unsri, serta hilirisasi hasil riset. MoU ini diharapkan dapat menjadi wujud nyata komitmen BPOM dan Unsri untuk terus berpartisipasi aktif dalam membantu meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui peran serta civitas akademika dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Penandatanganan MoU BPOM dengan PBB, Kenya dan ANARME, Mozambik

Dalam rangkaian kunjungan Presiden RI ke Afrika pada 20-24 Agustus 2023, beberapa *deliverables* yang terkait dengan MoU telah disepakati dan ditandatangani, antara lain *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BPOM dengan *Pharmacy and Poisons Board* (PPB) serta MoU antara BPOM dengan *Autoridade Nacional Reguladora de Medicamento* (ANARME) Mozambik.

Kedua MoU diharapkan dapat memfasilitasi penguatan teknis bagi regulator Kenya dan Mozambik dan pertukaran informasi terkait regulasi obat, produk biologi, obat tradisional,

obat kuasi dan suplemen kesehatan untuk kemudahan akses ekspor ke kedua negara tersebut.

Studio Broadcast PN23



BPOM hadir dengan *Studio Broadcast* PN23 sebagai ruang bereksplorasi untuk mengembangkan ide kreatif dalam menciptakan program komunikasi dan edukasi.

Ruang kreatif dengan standar *broadcasting* ini hadir untuk memfasilitasi para kreator di BPOM dalam memproduksi konten seperti *podcast*, *talkshow*, fotografi rekaman suara, dan konten digital lainnya.

Video Kinerja Peresmian Infrastruktur



Video peresmian infrastruktur ini berisi inovasi yang dihadirkan BPOM saat HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia. Terdapat empat infrastruktur yang diresmikan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Laboratorium Forensik Digital, Laboratorium Biosafety Level 3, dan Studio Broadcast PN23.

Video tersebut ditayangkan pada Puncak Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI yang dihadiri oleh seluruh jajaran BPOM dari tingkat pusat maupun perwakilan Balai Besar/Balai/Loka POM, dan media.

SEPTEMBER

Majalah POM Vol.5/No.2/2023



Pada Triwulan 4 tahun 2023, telah diterbitkan Majalah POM (MaPOM) Vol.5/No.2/2023 pada 29 September 2023. Edisi kali ini mengusung tema utama Kiprah BPOM di Kancah Global. Banyak gelaran yang dihelat BPOM bersama mitra internasional seperti WHO dan Pharmaceuticals and Medical

Devices Agency (PMDA) Jepang untuk meningkatkan jaminan kualitas obat. BPOM juga ambil bagian dalam pengawalan keamanan pangan pemimpin negara pada KTT ASEAN ke-24 dan keamanan pangan jamaah haji Indonesia.

MaPOM hadir dalam bentuk digital dapat diakses melalui https://bit.ly/MaPOM_Vol5_No2_2023 untuk menampilkan visual yang lebih interaktif

Site visit dan On-site inspection Saudi Food and Drug Authority (SFDA)

Pada tanggal 5 hingga 11 September 2023, Saudi Food and Drug Authority (SFDA) melaksanakan kunjungan ke Indonesia untuk melakukan kegiatan on-site inspection terhadap 6 Unit Pengolah Ikan (UPI) dan 3 tambak ikan. Rangkaian kegiatan dimulai dengan acara opening meeting pada 4 September 2023, yang dihadiri oleh berbagai lembaga terkait seperti KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, BPJPH, dan BPOM. SFDA menyampaikan fokus auditnya terutama pada mekanisme pengawasan produk perikanan, tindakan terhadap temuan ketidaksesuaian, dan kebijakan produk GMO serta iridiasi.

Selama kunjungan mereka, Saudi Food and Drug Authority (SFDA) melakukan audit ke 6 Unit Pengolah Ikan (UPI) dan 3 tambak ikan di Indonesia. Berikut adalah daftar UPI dan tambak ikan yang dikunjungi oleh SFDA:

Unit Pengolah Ikan (UPI):

1. Pahala Bahari Nusantara, Cikarang;
2. Suri Tani Pemuka, Cirebon
3. Alam Jaya, Surabaya
4. Sekar Laut, Sidoarjo
5. Phillips Seafood, Pasuruan
6. Muria Bahari, Kudus

Tambak Ikan:

1. Indonusa Yudha Perwita, Indramayu
2. Nuril Anwar, Pemalang
3. Al Muchlisin, Kediri

Selama proses audit di UPI dan tambak ikan, SFDA mengidentifikasi beberapa *non-conformity* yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak Indonesia, termasuk dalam hal kompetensi inspektur, laporan audit pemerintah Indonesia, dan kebijakan pengawasan.

Hasil pembahasan pada acara *closing meeting* menyoroti perbedaan perspektif antara SFDA dan Indonesia serta langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi, termasuk klarifikasi dan peningkatan pelatihan bagi para inspektur serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait di Indonesia. SFDA juga menekankan pentingnya sertifikasi kesehatan untuk ekspor ke Arab Saudi yang harus diterbitkan oleh *National Competent Authority* (NCA), yang bisa merupakan Badan POM (BPOM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), atau kementerian/lembaga lainnya.



OKTOBER

Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke Kuba



Pada tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2023, Kepala BPOM berkunjung ke Kuba untuk bertemu dengan pimpinan The Center for State Control of Medicines, Medical Equipment and Devices (CECMED), BioCubaFarma, dan Centro de Inmunologia Molecular (CIM). Kunjungan ini bertujuan

sebagai pendampingan dalam proses transfer teknologi produk bioteknologi obat kanker Theracim (Nimotuzumab) dari CIM Kuba kepada Industri Farmasi dalam negeri, termasuk pembuatan *Drug Substance* (DS) dan *Drug Product* (DP) sehingga dapat mendukung ketersediaan produk dalam negeri.



BPOM akan mengidentifikasi potensi kerja sama dengan CECMED Kuba terkait transfer teknologi produk biofarmasetikal ke Indonesia dan mendukung proses keanggotaan CECMED dalam organisasi internasional seperti *Pharmaceutical Inspection Convention* (PIC/s).

Guna Capai SDM Berdaya Saing Global, BPOM Kerja Sama dengan Universitas Ternama di Amerika Serikat Untuk Peningkatan Kapasitas SDM

Kepala BPOM berkunjung ke Harvard Kennedy School, Boston, Amerika Serikat pada 24 s.d. 30 September 2023 untuk mendapatkan wawasan mengenai program peningkatan kapasitas di Harvard Kennedy School termasuk pelatihan di bidang *strategic management of regulatory and enforcement agencies* yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi BPOM dalam merancang kebijakan yang efektif,



mengatasi perubahan, dan menghadapi tekanan politik serta deregulasi yang mungkin muncul.

Selain itu, Kepala BPOM juga berkunjung ke Michigan, Amerika Serikat pada 4-8 Oktober 2023 untuk penandatanganan MoU dengan *Michigan State University* mengenai pengembangan kapasitas SDM.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pembahasan rencana program pelatihan dan pembiayaan kegiatan di bawah MoU. Rencana kolaborasi ini akan dilaksanakan di bawah program sinergisme pemangku kepentingan (*Academia-Business-Government*) karena pada prinsipnya keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama termasuk juga pelaku usaha.



Dalam kesempatan tersebut, BPOM juga bertemu dengan Neogen di Michigan Amerika Serikat untuk berdiskusi mengenai alat laboratorium/*test kits* yang dikembangkan oleh Neogen yang mungkin dapat dimanfaatkan sebagai usaha peremajaan terhadap alat laboratorium/*test kits* dalam Mobil Keliling (Mobling) menjadi lebih *advance* dan cepat.

Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dengan Wirawati Catur Panca



Pada tanggal 24 Oktober 2023, BPOM menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* antara BPOM dengan Wirawati Catur Panca (WCP) tentang Pemberdayaan Wirawati Catur Panca di Bidang Obat dan Makanan. Wirawati Catur Panca adalah salah satu

mitra strategis perpanjangan tangan BPOM dalam edukasi obat dan makanan aman kepada masyarakat.

Tujuan dari MOU ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan dalam rangka membangun keluarga sehat dan sejahtera. Dengan adanya MOU ini, menunjukkan bahwa BPOM terbuka untuk memperluas kerja sama dengan para pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dengan 8 Asosiasi Obat dan Makanan serta Pengelola Kawasan TWAAK dan Ekowisata Mangrove PIK



BPOM berkolaborasi dengan Asosiasi Obat dan Makanan (GP Farmasi Indonesia, IPMG, AB30, GP Jamu, APSKI, Perkosmi, PPA Kosmetika dan GAPMMI) mendukung *Net-Zero Carbon Programme* dengan melakukan penanaman pohon mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk (TWAAK) dan Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Program ini ditujukan untuk mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat terutama pelaku usaha dalam pelestarian alam untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kelestarian alam khususnya ekosistem mangrove.

BPOM akan menanam sebanyak 47,8 ribu pohon mangrove selama 5 tahun ke depan. Pada Tahun 2023 sebanyak 16 ribu pohon mangrove telah dilaksanakan penanamannya oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM secara serentak di seluruh Indonesia bersama

stakeholder di daerah masing-masing. Tahun berikutnya, akan dilakukan penanaman minimal 30 ribu pohon pada tahun 2024-2027.

Mempertimbangkan program ini bersifat lintas tahun (*multiyears*) sehingga memerlukan komitmen para pihak yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara BPOM, 8 Asosiasi Obat dan Makanan dengan PT. Murindra Karya Lestari (Pengelola TWAAK) dan Kelompok Tani Hutan Flora Mangrove (Pengelola Ekowisata Mangrove PIK). Adapun penandatanganan MoU ini telah dilaksanakan secara seremonial pada tanggal **31 Oktober 2023** sekaligus penanaman 200 pohon secara simbolis.

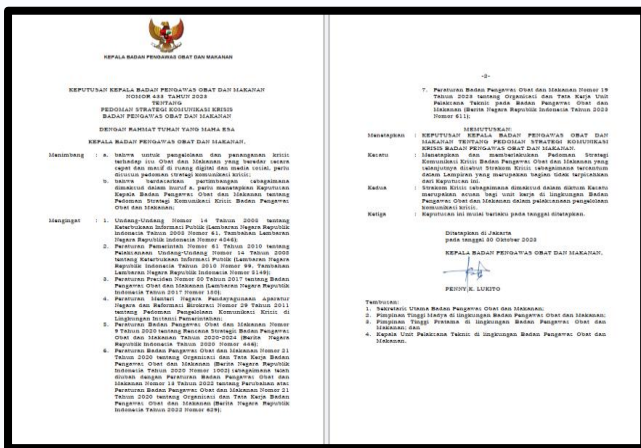
Pedoman Pengelolaan Media Sosial BPOM

Biro Kerja Sama dan Humas menyusun Pedoman Pengelolaan Media Sosial BPOM yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 432 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 30 Oktober 2023. Pedoman ini merupakan acuan komunikasi digital yang digunakan oleh BPOM mulai dari perencanaan, aktivitas, dan evaluasi dalam konteks kehumasan digital pada kanal media sosial.

Pedoman ini terdiri dari Pedoman Pengelolaan Media Sosial BPOM Official dan Pedoman Pengelolaan Media Sosial Unit Kerja dan Unit. Beberapa poin utama yang diatur dalam pedoman ini antara lain pengelolaan media sosial secara umum, produksi konten, publikasi konten, dokumentasi konten, interaksi, dan evaluasi.



Pedoman Strategi Komunikasi Krisis BPOM



Pedoman Strategi Komunikasi Krisis BPOM (Strakom Krisis) ditujukan sebagai acuan bagi BPOM dalam pelaksanaan pengelolaan komunikasi krisis. Latar belakang dibuatnya Strakom Krisis yaitu isu obat dan makanan beredar secara cepat dan masif di ruang digital termasuk media sosial. Apabila tidak ditangani dengan baik isu tersebut dapat berpotensi menimbulkan krisis yang harus dihadapi BPOM. Selain itu,

belum adanya juga pengaturan tentang komunikasi krisis di lingkungan BPOM.

Pedoman Strategi Komunikasi Krisis BPOM telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pedoman Strategi Komunikasi Krisis BPOM.

Video Kinerja

1. Peresmian Peningkatan Status UPT BPOM



Tantangan dalam pengawasan obat dan makanan untuk mengawal obat dan makanan aman berkhasiat bermanfaat bermutu dan berdaya saing menjadikan BPOM terus berupaya memperkuat UPT di seluruh pelosok negeri untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks serta menjangkau pengawasan obat dan makanan hingga pelosok negeri. Video ditayangkan pada kegiatan peresmian 8 Balai POM dan 3 Loka POM yang dilaksanakan di Kediri, 24 Oktober 2023.

2. *Grand Design* Gedung UPT BPOM



BPOM menyusun *grand design* sarana dan prasarana unit pelaksana teknis sebagai *prototype* sistem pengawasan obat dan makanan yang bertujuan untuk pelayanan publik yang lebih prima seperti fasilitas yang ramah untuk disabilitas dan meningkatkan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik. Video ditayangkan pada kegiatan peresmian 8 Balai POM dan 3 Loka POM yang dilaksanakan di Kediri, 24 Oktober 2023.

NOVEMBER

Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dengan Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto dan RMI PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta



Kepala BPOM, Penny K. Lukito, menandatangani Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah di Mojokerto dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (RMI PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pengembangan Santripreneur di Pondok Pesantren pada hari **Kamis, 2 November 2023**. Kerja sama ini antara BPOM dengan pondok pesantren ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, maupun mengembangkan kewirausahaan di bidang obat dan makanan.

Ketua RMI PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, KH. Muhammad Nilzam Yahya, mengungkapkan rasa bangganya atas penandatanganan nota kesepahaman tersebut. "Saya merasa bangga dan bahagia karena diundang BPOM. BPOM hadir di Ponpes itu luar biasa. Ada tiga hal yang kami harapkan. Pertama adanya keberlanjutan atau tindak lanjut dari MoU ini, yaitu terkawal dan terjaminnya makanan santri. Kedua adanya pendampingan intensif kepada santri dan alumni yang menjadi pelaku usaha, dan ketiga, kerja sama ini istiqamah.

Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dengan Universitas Sahid

Kepala BPOM, Penny K. Lukito, menandatangani Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Universitas Sahid (USAHID) tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di Jakarta, 3 November 2023.

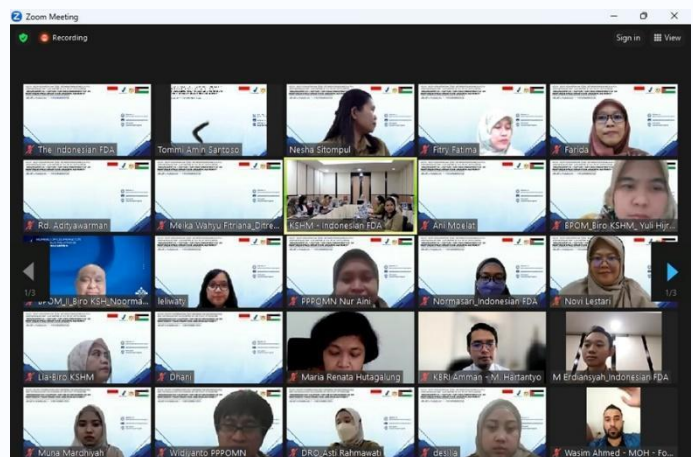


Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara BPOM dengan USAHID) dalam rangka, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak. Kerja sama yang telah diimplementasikan antara BPOM dan USAHID sebelumnya antara lain seperti pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan & Magang pada program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC) dan Kompetisi Nasional BPOM (KOMIK) serta kegiatan BPOM lainnya.

Selanjutnya, BPOM dan USAHID akan menyiapkan rencana aksi yang akan menjelaskan secara rinci ruang lingkup kerja sama dalam MOU tersebut dengan semangat kolaborasi untuk saling mendukung tugas pendidikan dan pembangunan bangsa khususnya di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Peningkatan Kompetensi Regulator Obat dan Makanan Palestina

BPOM telah menyelenggarakan program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina secara *online* di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina pada tanggal 7 – 9 November 2023. KSS ini bertujuan untuk melanjutkan komitmen BPOM dalam mendukung pembentukan Otoritas Obat dan Makanan di Palestina yang independen, melalui peningkatan kapasitas regulator Obat dan Makanan Palestina.



Kegiatan KSS Palestina tahun 2023 ini diikuti oleh 39 (tiga puluh sembilan) peserta dari Kementerian Kesehatan Palestina. Sejak tahun 2018 hingga 2023, Kementerian Kesehatan Palestina telah memperoleh berbagai materi pelatihan yang dikategorikan seperti Regulasi dan persyaratan kriteria GMP, pengawasan distribusi dan peredaran, serta administrasi dan sistem informasi.



Kementerian Kesehatan Palestina berharap untuk adanya pelatihan secara luring di Palestina atau di Yordania agar dapat berdiskusi secara mendalam dalam kelompok kecil dan melakukan simulasi.

Pengawasan Keikutsertaan BPOM pada Forum *Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (MSM SFMP)*



BPOM terlibat aktif pada forum *Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (MSM SFMP)*, yang merupakan forum untuk *sharing informasi* dan pengalaman serta pengembangan kapasitas regulator dalam pengawasan obat dan alat medis palsu dan dibawah standar. Forum ini secara rutin melaksanakan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yaitu pertemuan *Steering Committee* pada bulan Maret dan Juni, serta pertemuan besar pada bulan November 2023.

Pada forum ini, BPOM masuk ke dalam beberapa *Working Groups*, antara lain *activity A* yang berfokus pada perkuatan kapasitas dari *national/regional regulatory authorities* untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons obat dan alat medis yang palsu dan dibawah standar. Selain itu, BPOM juga masuk ke dalam *activity C*, dimana fokus dari *Working Group* ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan teknologi oleh Negara Anggota untuk menyaring dan mendeteksi obat dan alat medis yang substandard dan palsu, serta implementasi dari sistem pelacakan secara nasional.

Working Group lain, dimana BPOM juga menjadi *member* dan aktif memberikan kontribusi adalah pada *activity G* yang berfokus pada pengembangan strategi yang tepat untuk mengatasi pendistribusian produk medis yang substandard dan palsu melalui

internet, dan *activity H* tentang pengembangan strategi bagi *National Regulatory Authorities* untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh peredaran produk medis substandar dan palsu pada pasar informal.

Tahun ini, BPOM bersama dengan PTRI Jenewa, sebagai *Vice-Chair* dari *South-East Asia Region* bersama India, telah mengikuti 2 (dua) pertemuan *Steering Committee Member* pada tanggal 9 – 10 Maret 2023 dan tanggal 14 November 2023. Selain itu, BPOM juga mengikuti pertemuan MSM tanggal 15 – 17 November 2023.

Dalam pertemuan Sekretariat melakukan pemutakhiran kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan rencana kerja MSM. Meskipun upaya mobilisasi sumber daya terus dilakukan, Sekretariat mencatat bahwa keberlanjutan finansial rencana kerja untuk tahun 2024-2025 masih menjadi perhatian.

Selain itu, Sekretariat juga memberikan gambaran umum mengenai insiden penggunaan sirup yang dijual bebas untuk anak-anak yang dipastikan atau diduga terkontaminasi dengan dietilen glikol (DEG) dan etilen glikol (EG) dengan kadar tinggi. Gambaran tersebut mencakup deskripsi konteks sejarah dan insiden yang dilaporkan, dimana WHO mengeluarkan *medical products alerts* serta aktivitas pencegahan, deteksi, dan respons.

WHO mendorong Negara-negara Anggota untuk terbuka dan melaporkan secara komprehensif insiden yang melibatkan produk obat substandar dan dipalsukan yang dapat memberikan dampak langsung dan luas terhadap Negara-negara Anggota lainnya.

Pertemuan bersama Mitra Kerja Sama Korea Selatan

Kunjungan kerja BPOM dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Korea Selatan pada tanggal 12-18 November 2023 merupakan sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di sektor pangan dan kosmetik-obat. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memperkenalkan BPOM dan BPK kepada pusat riset dan industri terkait di Korea Selatan serta menjajaki peluang kerja sama di berbagai bidang, termasuk pengembangan produk berkelanjutan dan peningkatan kepatuhan regulasi.



Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BPOM dan BPK mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak terkait di Korea Selatan. Salah satu pertemuan yang dilakukan adalah dengan Pusat Riset dan Industri Cheil Jedang (CJ). Pada kesempatan tersebut, BPOM dan BPK mempelajari feasible riset dan teknologi yang dimiliki oleh CJ dalam pengembangan produk di Indonesia yang berkelanjutan. Pihak BPOM dan BPK juga

berdiskusi mengenai potensi kolaborasi dengan CJ untuk strategi pemberantasan stunting yang lebih efektif.

Selain itu, BPOM dan BPK juga melakukan kunjungan ke Industri Green Cross Bio-Pharmaceutical (GC). Di sana, mereka dapat melihat secara langsung teknologi dan inovasi yang dimiliki oleh GC. Kunjungan ini dilakukan guna menjajaki kemungkinan kerja sama dalam kemandirian pasokan plasma serta kerja sama internasional yang lebih erat dalam industri biofarmasi antara Indonesia dan Korea Selatan.

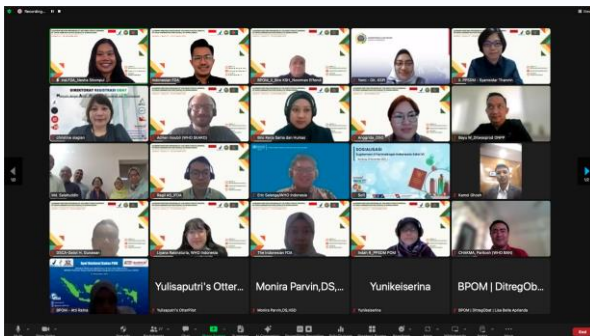


Selama kunjungan, BPOM juga membahas pertukaran informasi dan latihan kepatuhan regulasi, terutama mengenai Good Manufacturing Practice (GMP). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan di Indonesia memiliki kualitas dan keamanan yang terjamin, serta menerapkan praktik keberlanjutan di industri, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengembangan produk ramah lingkungan. BPOM juga menyatakan dukungan terhadap

investasi perusahaan Korea di Indonesia, seperti pengembangan industri fraksinasi plasma, kosmetik bahan alam, dan produk makanan untuk strategi pemberantasan stunting.

Kunjungan kerja BPOM dan BPK ke Korea Selatan ini diharapkan dapat memberikan landasan kuat untuk kerja sama yang lebih lanjut antara Indonesia dan Korea di bidang pangan dan kosmetik-obat. Adanya kerja sama ini diyakini memiliki potensi untuk menciptakan terobosan signifikan dan meningkatkan keamanan serta kualitas produk bagi masyarakat Indonesia.

KSST Bangladesh pada tanggal 27-28 November 2023



BPOM telah menyelenggarakan program *Capacity Building* (CB) dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) bagi Regulator Obat Bangladesh secara *online* di Jakarta, Indonesia dan Dhaka, Bangladesh pada tanggal 27 – 28 November 2023. KSST ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan regulasi vaksin di Bangladesh guna mencapai *Maturity Level*

3 WHO *Global Benchmarking Tools* (GBT). Dengan mencapai *Maturity Level* 3 ini, Bangladesh berharap untuk mendapatkan status regulasi yang diakui secara internasional sehingga Bangladesh dapat menjadi bagian dari *global supply chain* vaksin.

Launching Buku Karya dan Kinerja7a Melewati Multi Krisis Pandemi COVID-19

BPOM telah merangkum berbagai catatan sejarah dan cerita nyata dari perjalanan berharga yang telah dilewati BPOM dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 melalui sebuah buku kinerja yang berjudul “Karya & Kinerja7a Melewati Multi Krisis: Pandemi COVID-19”.

Buku ini menceritakan bagaimana kepiawaian BPOM dalam mengelola rangkaian krisis selama dan pasca pandemi COVID-19 yang telah menjadikan BPOM semakin kuat dan percaya diri sebagai institusi regulator yang selalu tangguh menjaga, melindungi, dan melayani masyarakat. Selain itu dalam buku ini juga turut diceritakan bahwa dalam saat bersamaan BPOM terus mendorong dunia industri/usaha obat dan makanan agar tumbuh maju dan berdaya saing tinggi di tengah krisis pandemi.



Pada 6 November 2023, BPOM meluncurkan Buku Kinerja Pandemi “Karya & Kinerja7a, Melewati Multi Krisis: Pandemi COVID-19” di Auditorium Gedung Merah Putih Lt. 8, BPOM. Konsep *launching* buku kinerja dikemas secara melalui *talkshow* bedah buku dan publikasi kinerja BPOM 3 tahun masa pandemi. Di kesempatan itu juga, BPOM meluncurkan sarana dan prasarana

BPOM, produk informasi obat dan makanan, serta program intensifikasi pengawasan dan penindakan obat dan makanan ilegal.

Video Kinerja

1. Launching Buku Kinerja BPOM



Berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat menjadikan BPOM satu-satunya harapan masyarakat dalam memastikan produk yang aman, terutama obat dan vaksin COVID-19. Berbagai terobosan dan kemudahan dihadirkan BPOM untuk berkontribusi dalam percepatan penanganan pandemi.

Video ditayangkan saat *Launching* Buku Kinerja “Karya & Kinerja7a, Melewati Multi Krisis: Pandemi COVID-19” pada 6 November 2023 dihadiri oleh seluruh jajaran BPOM dari tingkat pusat maupun Balai Besar/Balai/Loka POM dan sejumlah tamu undangan yang berperan dalam melawan pandemi.

2. 7 Tahun Kinerja



Selama 7 tahun kepemimpinan Kepala BPOM, Penny K. Lukito, Humas BPOM terus mengepakkan sayapnya beradaptasi dan terus berinovasi sesuai kebutuhan informasi publik. Video ini dipersembahkan sebagai apresiasi atas pengabdian dan kinerja Kepala BPOM Periode 2016-2023.

3. Mars BPOM



Mars BPOM merupakan wujud semangat dari BPOM untuk menegakkan nilai profesionalisme dan mengutamakan kerjasama agar dapat terus menjamin pangan aman bagi masyarakat Indonesia. Video Mars BPOM ini ditayangkan pada setiap kegiatan apel senin pagi atau saat hari besar kenegaraan.

Podcast KataBPOM

Podcast Eps 1: Kenali Kekayaan Kosmetik Tematik Asli Indonesia



Kosmetik tematik adalah salah satu bentuk keanekaragaman budaya Indonesia, sebagai contoh telah dikenal pada beberapa daerah seperti kosmetik Bali (lulur dan spa), kosmetik Jawa (keraton), kosmetik Banjarmasin (bedak dingin) serta kosmetik berbahan alam lokal Indonesia.

Video *podcast* ini menjadi episode awal dari penayangan *podcast* kataBPOM yang diluncurkan di kanal Youtube BPOM RI.

DESEMBER

Pengesahan Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (Saka POM)



Satuan Karya Rintisan Pengawas Obat dan Makanan telah disahkan sebagai Saka Nasional pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI pada tanggal 4 Desember 2023 di Banda Aceh. Keputusan pengesahan ini dituangkan pada Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor

08/Munas/2023 tentang Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan.

Sejak dirintis pada tahun 2018, Saka POM telah berkembang di 30 Kwartir Daerah dan 175 Kwartir Cabang, serta berperan aktif dalam pendidikan generasi muda Indonesia melalui Pendidikan Kepramukaan, dengan kekhususan pada keahlian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPOM dan Badan Pangan Nasional



Pt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalucia melakukan penandatanganan MoU antara Kementerian Agama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPOM dan Badan Pangan Nasional tentang Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal secara *desk to desk* di Kantor BPOM.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komitmen Kementerian/Lembaga dalam upaya percepatan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan MoU ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan dibentuk Tim Koordinasi Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Majalah POM Vol.5/No.3/2023

Pada Triwulan 4 tahun 2023, telah diterbitkan Majalah POM (MaPOM) Vol.5/No.3/2023 pada 19 Desember 2023. Edisi kali ini mengusung tema utama Semarak Inovasi BPOM Menuju Indonesia Maju.

Sebanyak 17 artikel yang tersebar dalam rubrik Ruang Utama, Ruang Belajar, Ruang Tamu, Ruang Kerja, Jendela, Bingkai, dan Dapur UMKM. Selain itu, terdapat tujuh infografis edukasi obat dan makanan dan satu komik SAKA POM.



MaPOM hadir dalam bentuk digital dapat diakses melalui https://bit.ly/Mapom_Vol5_No3_2023 untuk menampilkan visual yang lebih interaktif.

Survei Opini Publik



Pada Oktober-November 2023 telah dilakukan survei opini publik dengan sampel sebanyak 1.600 responden dan dilakukan di 34 provinsi dengan metode wawancara langsung. Responden berusia 15-65 tahun dengan asumsi telah mengetahui BPOM melalui media massa, media sosial, dan/atau aplikasi pesan. Sama seperti tahun sebelumnya, terdapat enam aspek pengukuran pada survei opini publik tahun 2023 yaitu kesehatan, ekonomi,

penindakan, peraturan, pelayanan publik, dan isu obat dan makanan. Selain itu juga terdapat parameter sub aspek yaitu pengetahuan, citra, sikap, dan kepuasan. Dari hasil survei, diperoleh indeks opini publik BPOM tahun 2023 sebesar 85,04. Indeks tahun 2023 meningkat 0,28 poin dari indeks tahun 2022 yaitu sebesar 84,76. Angka indeks ini termasuk dalam kategori Sangat Percaya terhadap BPOM.

Survei Indeks Kepuasan Media

Tujuan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Media yaitu untuk memperoleh Indeks Kepuasan Media Tahun 2023, yang juga menjadi salah satu indikator kinerja dari sasaran program peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama. Selain itu, juga untuk melakukan analisis terhadap kepuasan dan persepsi/opini media terhadap pelayanan kehumasan BPOM. Juga untuk memperoleh masukan dan harapan media dari pelayanan kehumasan yang diberikan oleh BPOM ke depannya.

Berdasarkan hasil survei, diperoleh skor IKM dari BPOM adalah 3,09 (skala 4) atau 77,13 (skala 100) sehingga masuk kategori mutu BAIK (B). Dari seluruh dimensi yang disurvei pada tahun 2023 ini, skor tertinggi terlihat pada komponen Biaya Layanan (84,38) dan skor terendah pada komponen Sarana dan Prasarana (74,40).

Indeks kepuasan media tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 3,58 poin dibandingkan dengan tahun 2022.

Study Visit Tanzania Medicines and Medical Devices Authority (TMDA)



BPOM memfasilitasi permohonan *study visit Tanzania Medicines and Medical Devices Authority (TMDA)* terkait pemeriksaan dan pengendalian ekspor dan impor obat di Indonesia untuk 2 (dua) orang staff TMDA. *Study visit* berlangsung dari tanggal sampai tanggal 7-19 Desember 2023.

BPOM memberikan *sharing knowledge* terkait *Regulatory GMP inspection in Indonesia, Good Distribution Practice Inspection, Sharing information* laboratorium produk biologi PPPOMN *on Post Market Surveillance Control, Control of Advertisement & Promotion Activities, Pharmacovigilance in Indonesia, Combating Illegal Food and Drug in Indonesian online Market: A Cyber Investigation Approach, Drug Crime Prevention, Law Enforcement, Investigation of Pharmaceutical Crime, Marketing Authorization System in Indonesia.*

Selain penyampaian materi, peserta TMDA mendapatkan kesempatan mengenal kapasitas dan potensi perusahaan Indonesia untuk mengeksport obat-obatan ke Tanzania melalui kunjungan ke industri farmasi dan sarana distribusi.

Podcast KataBPOM

1. Podcast Eps 2: Intensifikasi Pengawasan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024



B POM melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk mengantisipasi beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan, sekaligus dalam rangka melindungi masyarakat dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan, mengingat pada waktu tertentu seperti menjelang natal dan tahun baru kegiatan belanja masyarakat meningkat.

2. Podcast Eps 3: Waspada Klaim Suplemen Kesehatan Berlebihan



Kehadiran *podcast* waspada klaim suplemen kesehatan berlebihan menunjukkan peran penting B POM dalam menjaga dan mengawasi masyarakat agar terhindar dari pangan yang berbahaya untuk dikonsumsi. *Podcast* episode ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat tentang tata cara memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Instansi

1.1.1. Visi dan Misi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merupakan unit kerja di bawah Sekretariat Utama yang memberikan dukungan manajemen di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mendukung pencapaian visi dan misi BPOM yaitu:

Visi:

“Obat dan Makanan Aman meningkatkan Kesehatan masyarakat dan daya siang bangsa”

Misi:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

1.1.2. Tujuan

Sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Utama, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Utama BPOM, yaitu:

- a. Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi *stakeholder* Sekretariat Utama; dan

- c. Terwujudnya Unit Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional, dan inovatif.

1.1.3. Tugas dan Fungsi

Untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut, serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatanselatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dan opini publik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

1.1.4. Budaya Organisasi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat senantiasa mengedepankan penerapan *Core Value* Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Budaya Organisasi BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. *Core value* dan budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.

Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

Sebagai ASN, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menerapkan *core value* BERAKHLAK seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Core Value BERAKHLAK

Core value ini senantiasa diterapkan melalui 6 (enam) budaya kerja yang disingkat dalam akronim PIKKIR, dengan penjelasan seperti pada Gambar 2:

| | |
|--------------------------|--|
| Profesional | Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi |
| Integritas | Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai- nilai luhur dan keyakinan |
| Kredibilitas | Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional |
| Kerja Sama Tim | Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik |
| Inovatif | Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaiuan teknologi terkini |
| Responsif/ Cepat Tanggap | Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah |

Gambar 2. Budaya Kerja PIKKIR

1.1.5. Struktur Organisasi

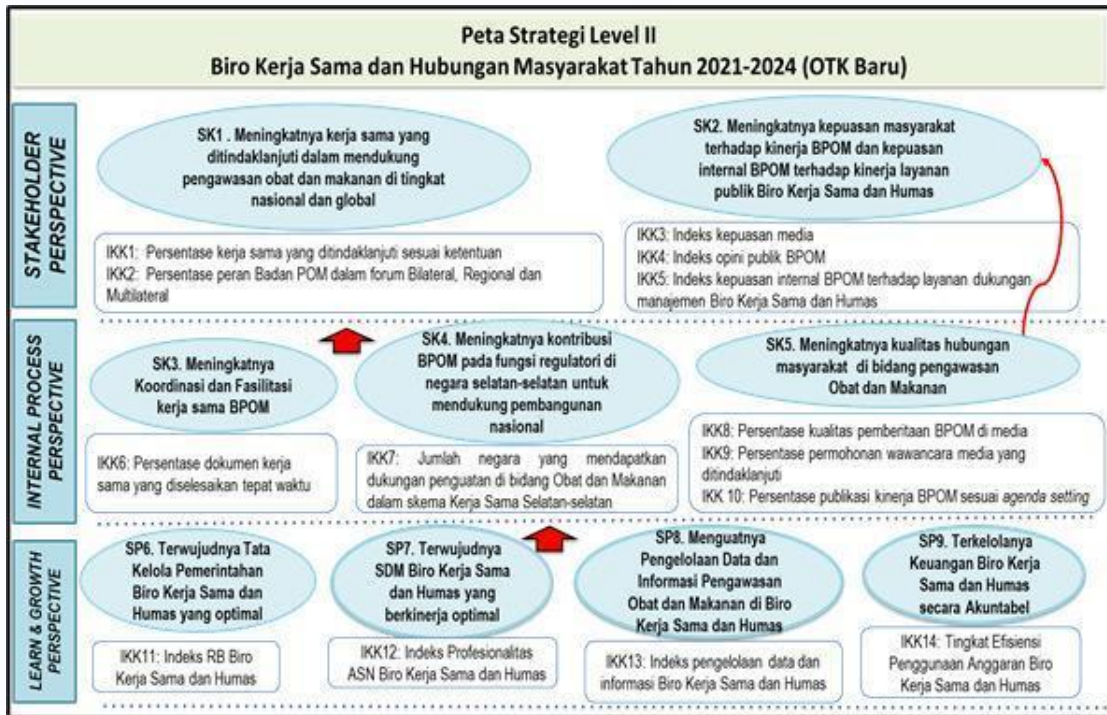
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara struktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama BPOM. Sejalan dengan penyederhanaan organisasi dan birokrasi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung dengan Jabatan Fungsional dengan dukungan koordinator dan sub koordinator, seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

1.2. Peta Strategi, Sasaran dan Indikator

Untuk mengukur kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyusun peta strategi, sasaran dan indikator sebagaimana Gambar 4. Perkembangan situasi dan perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal mempengaruhi fungsi strategis BPOM dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.



Gambar 4. Peta Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Pada tahun 2023, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki 9 Sasaran Program dan 14 indikator sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88 |
| 2. | Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global | Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral | 88 |
| 3. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas | Indeks kepuasan media | 77 |
| 4. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan | Indeks opini publik BPOM | 85 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------------|
| | internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas | | |
| 5. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas | 3,87 |
| 6. | Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM | Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu | 84 |
| 7 | Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional | Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan | 2 |
| 8. | Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | 99,85 |
| 9. | Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | 79 |
| 10 | Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan | Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai <i>agenda setting</i> | 95,5 |
| 11. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal | Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas | 82 |
| 12. | Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas | 83 |
| 13 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas | Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas | 2,5 |
| 14. | Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas | 90 (Efisien) |

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung oleh 5 (lima) kelompok substansi dengan jumlah pegawai pada tahun 2023 terdiri dari 60 orang, yang terdiri dari 45 orang PNS, 4 orang P3K dan 11 orang PPNPN.

2.1.1. Data Kepegawaian

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat saat ini didukung dengan mayoritas SDM yang berpendidikan Pascasarjana (S2) dan Sarjana dalam usia produktif. Gambaran SDM Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan pendidikan seperti pada Tabel 2.

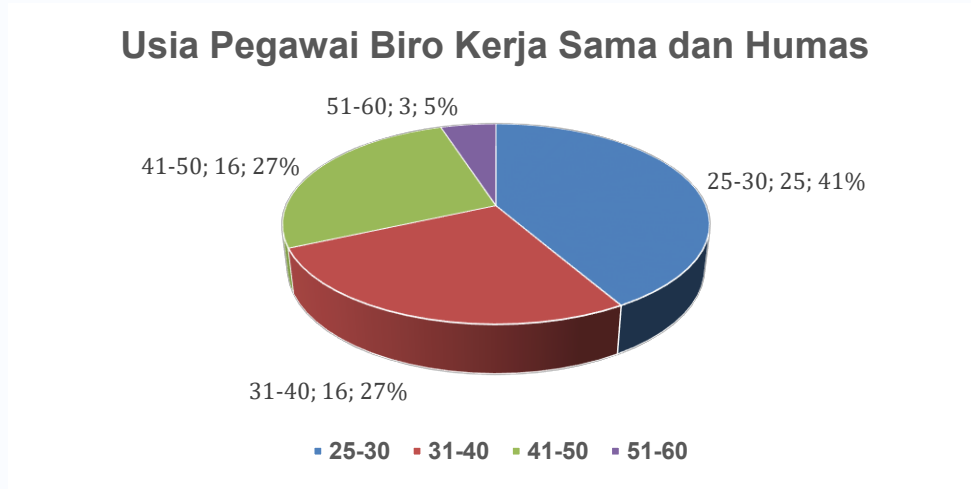
Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Jenjang Pendidikan | ASN | | PPNPN | | Total | |
|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| S2 | 12 | 20 | 0 | 0 | 12 | 20,00 |
| Profesi | 4 | 6,67 | 0 | 0 | 4 | 6,67 |
| S1 | 26 | 43,3 | 9 | 15 | 35 | 58,33 |
| D4 | 1 | 1,67 | 0 | 0 | 1 | 1,67 |
| D3 | 5 | 8,33 | 1 | 1,67 | 6 | 10,00 |
| SLTA | 1 | 1,67 | 1 | 1,67 | 2 | 3,33 |
| | 49 | 81,67 | 11 | 18,33 | 60 | 100,00 |

Dari latar belakang pendidikan, sebanyak 58,33% pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah Sarjana, diikuti oleh pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 20%, S1 Apoteker sebanyak 6,67% dan pendidikan Diploma dan SLTA 15%.

2) Berdasarkan Usia

Pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat termuda berusia 25 tahun dan tertua 59 tahun. dengan sebaran seperti pada grafik di bawah ini:



Gambar 5. Usia Pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

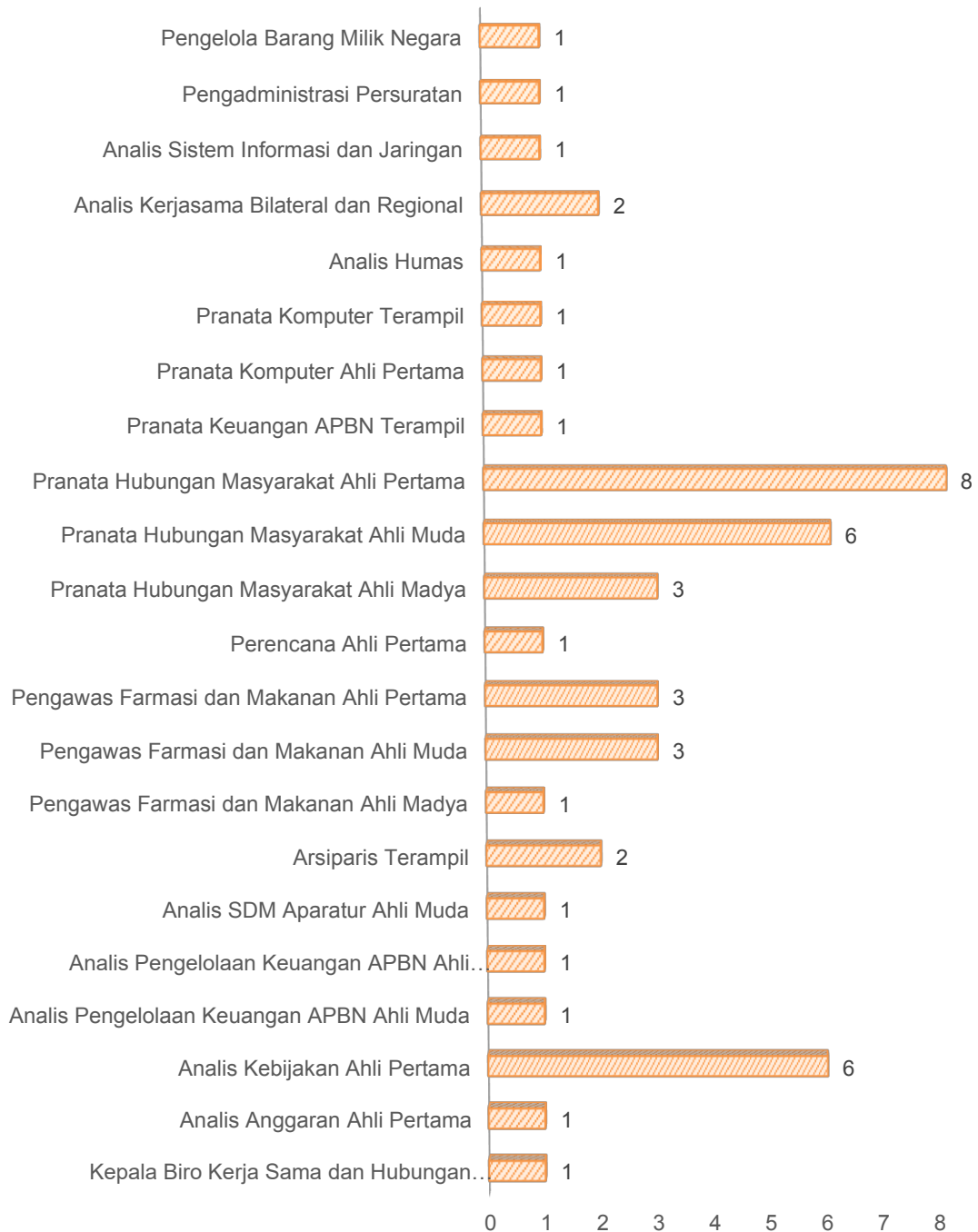
Berdasarkan data diatas Usia pegawai terbanyak berada pada usia 25-30 tahun sebanyak 41%, usia 31-40 tahun dan usia 41-50 tahun sama banyaknya sekitar 27%, sedangkan usia diatas 50 tahun terdapat 5% dari jumlah pegawai baik ASN maupun PPNPN.

Dan pada tahun 2024 terdapat 2 orang pegawai yang akan memasuki masa purnabakti, yang akan mengurangi jumlah SDM di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sehingga perlu untuk langkah antisipasi untuk menggantikan pegawai yg memasuki purnabakti tersebut baik dengan usulan permohonan penambahan SDM melalui jalur redistribusi maupun pengadaan pegawai melalui pengadaan CPNS/P3K.

3) Berdasarkan Jabatan

Dari 49 orang ASN, 1 (satu) orang menduduki jabatan struktural, 42 orang menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT), dan 6 orang menduduki jabatan fungsional umum. Gambaran data pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan jabatan sebagaimana Gambar 6.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN



Gambar 6. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

2.1.2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2023, kebutuhan SDM di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan jabatan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja

| No | Jabatan | ABK | Jumlah Pegawai | Gap |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 1 | Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Analisis Anggaran Ahli Pertama | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Arsiparis Ahli Pertama | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Arsiparis Mahir | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Arsiparis Terampil | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya | 0 | 1 | -1 |
| 12 | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | 0 | 3 | -3 |
| 13 | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Perencana Ahli Muda | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Perencana Ahli Pertama | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya | 9 | 3 | 7 |
| 17 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | 15 | 6 | 9 |
| 18 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | 23 | 8 | 18 |
| 19 | Pranata Keuangan APBN Terampil | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Pranata Komputer Mahir | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Pranata Komputer Terampil | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Pranata SDM Aparatur Mahir | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Pranata SDM Aparatur Terampil | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Analisis Humas | 0 | 1 | -1 |
| 26 | Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional | 0 | 2 | -2 |
| 27 | Analisis Sistem Informasi dan Jaringan | 0 | 1 | -1 |
| 28 | Pengadministrasian Persuratan | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Pengelola Barang Milik Negara | 0 | 1 | -1 |
| TOTAL | | 73 | 47 | 33 |

2.1.3. Peningkatan Kompetensi SDM

Untuk menjawab tantangan dan tanggung jawab pelaksanaan program dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan, yang semakin besar, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah pegawai saat ini, maka Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat membuat usulan perencanaan kebutuhan pendidikan lanjutan dan pendidikan pelatihan.

Peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2023, yaitu Pengajuan Tugas Belajar atas nama Erika Juliani. dengan mengambil Program Studi S-1 Sistem Informasi di Universitas Terbuka, Jakarta.

Sedangkan peningkatan kompetensi SDM Biro Kerja Sama dan Humas melalui pelatihan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Workshop Informasi dan Komunikasi, diantaranya terkait pelatihan sebagai berikut:
 - Katalis Informasi Optimal, Taklukkan Ruang Digital;
 - Workshop Hosting dan Public Speaking Podcast TA. 2023;
 - Sosialisasi di Bidang Teknologi dan Informasi / Meet The Expert, Volume 1;
 - Workshop in Digital Information / Workshop Branding, Promosi, Dan Perencanaan Podcast Tahun Anggaran 2023
- 2) Workshop Kerja Sama Dalam Negeri sebagai berikut:
 - Bimbingan Teknis Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2023, yang diikuti oleh Tim Pengelola Kerja Sama Dalam Negeri dari seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia
- 3) Bimbingan Teknis di Bidang Kerja Sama (Kerja Sama Luar Negeri) sebagai berikut:
 - Webinar "IT Management System for Food Safety
 - Webinar Badan POM dengan *Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia: Regulation of Complementary Medicines in Australia*
 - Bimbingan Teknis Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi / *PMDA-ATC Chemistry, Manufacturing and Control (CMC) Review Webinar 2023 for the Indonesian FDA*
 - Bimbingan Teknis Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi / 1. *Safe Food for Canadians Regulations -SFCR*, 2. Cabang Sains Laboratorium Pangan Dan Pengujian Kimia
 - Bimbingan Teknis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) /*Regulatory Strengthening Program (Rsp) Therapeutic Goods Administration (Tga) Australia Workshop Series - Bioavailability & Bioequivalence - Regulatory Considerations;*
- 4) Kursus Bahasa Asing yg diikuti oleh Pegawai Biro Kerja Sama dan Humas sebagai berikut:
 - Kursus English for Presentation
 - Kursus English For Negotiations

- 5) Pelatihan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain:
 - E-Learning Manajemen Risiko, Capacity Building Agent of Change BPOM
- 6) Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi antara lain:
 - Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif, ;
 - ASEAN-Japan Risk Management Plan (RMP) Symposium 2023,;
 - Risk Management Series, Studi Kasus Pengaturan ETO dan 2- CE dalam Pengawasan Produk Obat dan Makanan;
 - Seminar Peluang Pengembangan Kompetensi di Luar Negeri;
 - Resiliensi : Ketahanan Mental di Lingkungan Kerja;
 - Seni Mengelola Kecemasan dalam Bekerja dan Bahaya Self Diagnose;
 - Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Tematik BPOM 2023-2024;
 - Core Value BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, Loyal, Kompeten dan Harmonis;
 - Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan;
 - Sosialisasi Ciptakan Good Governance dengan Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik;
 - Sosialisasi Kebijakan Satu Data dalam mendukung SPBE;

2.2. Sarana dan Prasarana

Ruang kerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berlokasi di gedung Panacea Lantai 5 dan 6. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan, terdapat kebutuhan sarana dan prasarana Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

| No. | Sarana dan Prasarana | Jumlah diharapkan | Tersedia | Kebutuhan |
|-----|----------------------|-------------------|----------|-----------|
| 1 | PC | 56 | 43 | 13 |
| 2 | Laptop | 56 | 50 | 6 |
| 3 | Printer | 20 | 19 | 1 |
| 4 | Scanner | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Camera Digital | 12 | 11 | 1 |
| 6 | Handycam | 9 | 7 | 2 |
| 7 | Video Conference | 3 | 2 | 1 |

2.3. Anggaran

Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp 14.796.790.000**. Rincian anggaran dan realisasi selama tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023

| No | Program/Kegiatan/ Output | Volume | | | Anggaran | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | 3158 Peningkatan penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM | | | | 15.438.337.000 | 15.338.548.940 | 99,35% |
| | 3158.AEC.001 Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan | 90 | 72 | 108,89 % | 6.565.280.000 | 6.562.941.085 | 99,96% |
| 1 | 051 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral | 23 | 25 | 108,70 % | 2.433.014.000 | 2.432.623.792 | 99,98% |
| 2 | 052 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Regional dan Multilateral | 44 | 33 | 104,55 % | 1.406.681.000 | 1.406.074.632 | 99,96% |
| 3 | 053 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Dalam Negeri | 23 | 27 | 117,39 % | 1.954.123.000 | 1.953.107.084 | 99,95% |
| 4 | 054 Monitoring dan Evaluasi Kinerja | 1 | 1 | 100% | 771.462.000 | 771.135.577 | 99,96% |
| | 3158.EBA.003 Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1 | 1 | 100% | 8.489.587.000 | 8.392.285.885 | 98,85% |
| 1 | 051 Pemberitaan dan Hubungan Media | 1 | 1 | 100% | 2.121.387.000 | 2.086.776.670 | 98,37% |
| 2 | 052 Publikasi | 1 | 1 | 100% | 4.501.138.000 | 4.453.315.574 | 98,94% |

| No | Program/Kegiatan/ Output | Volume | | | Anggaran | | |
|----|--|----------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 3 | 053 Pengelolaan opini publik | 1 | 1 | 100% | 1.867.062.000 | 1.852.193.641 | 99,20% |
| | 3158.PEE.002 Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan- selatan (KSST) | 2 | 2 | 100% | 383.470.000 | 383.321.970 | 99,96% |
| 1 | 051 Penyelenggaraan kerja sama dengan negara di Asia Pasifik/Afrika | 1 | 1 | 100% | 82.400.000 | 82.391.970 | 99,99% |
| 2 | 052 Penyelenggaraan kerja sama dengan Negara Anggota OKI | 1 | 1 | 100% | 301.070.000 | 300.930.000 | 99,95% |

BAB III HASIL KEGIATAN BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

3.1 Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global

| | |
|--|--|
| SK1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global | |
| IKK 1 | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan |
| IKK 2 | Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral |

3.1.1 IKK 1: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|---|--|--------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Realisasi | Capaian |
| a | b | c | d | $e=(d/c \times 100)$ | f | g | $h=(g/f \times 100)$ |
| Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan | 88 | 89,74 | 101,98% | 2.968.412. | 2.967.336 | 99,96% |

Sasaran Kegiatan ke-1 (SK1) Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global, diturunkan menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

- a. IKK1 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan; dan
- b. IKK2 Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Target IKK1 sebesar 86 terpenuhi dengan realisasi sebesar 86,65 atau 100,76% dengan kategori (Baik).

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu "Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" Tahun 2023 adalah 89,74% dari target sebesar 88%, sehingga capaian indikator adalah 101,98% dengan kategori **Baik**.). Adapun

pagu anggaran pada IKK1 adalah sebesar Rp. 2.968.412.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.967.336.627 atau **99,96%**.

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memiliki adalah kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK1, antara lain:

- a. Dukungan tim koordinasi kerja sama dalam negeri dari unit-unit kerja pusat maupun Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) dari seluruh Indonesia. Tim ini tergabung dalam forum komunikasi melalui *Whatsapp Group* yang memudahkan penyampaian informasi terkait kerja sama. Anggota tim diperbarui setiap awal tahun dan setiap anggota baru dapat langsung bergabung ke forum komunikasi.
- b. *Monitoring* dan evaluasi implementasi kerja sama secara berkala setiap triwulan (3 bulan). Monitoring dan evaluasi (monev) penting dilakukan untuk memantau implementasi kerja sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Monev dilakukan secara periodik setiap triwulan untuk meningkatkan pemenuhan rencana kerja yang telah disusun antara unit pengusul dengan mitra kerja sama, selama jangka waktu kerja sama. Apabila terdapat kerja sama yang belum terpenuhi di awal tahun, maka unit pengusul dapat segera merumuskan tindak lanjut implementasi kerja sama pada periode berikutnya. Dengan demikian diharapkan seluruh kerja sama telah dapat terimplementasi sesuai rencana

kerja sebelum jangka waktu kerja sama berakhir. Monev kerja sama juga merupakan salah satu pertimbangan untuk menentukan urgensi perpanjangan kerja sama setelah jangka waktu kerja sama berakhir. Kerja sama yang terimplementasi dengan baik dapat diperpanjang atau diperbarui, namun sebaliknya, kerja sama yang tidak terimplementasi dengan baik akan menjadi pertimbangan untuk tidak diperpanjang atau diperbarui.

- c. Pelaksanaan inovasi sarana pelayanan publik Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melalui kegiatan KONEKSI (Konsultasi, mONitoring, dan Evaluasi Kerja Sama dalam negeri). KONEKSI diadakan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis secara daring melalui aplikasi Zoom;
- d. Implementasi dari *Grant Agreement on Improved Access to Essential Medicines and Vaccines - WHO Joint Work Plan Biennium 2022 – 2023* yang merupakan komitmen WHO untuk mendukung program/kegiatan prioritas Badan POM sesuai RPJMN 2020 – 2024, dalam rangka penguatan kapasitas Badan POM, termasuk laboratorium, guna meningkatkan akses obat dan vaksin.
- e. Implementasi berbagai kerja sama dalam negeri BPOM dengan mitra, khususnya di lingkungan UPT BPOM, seperti KIE, narasumber, dll.
- f. Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea, Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia*, serta partisipasi BPOM pada *Asian Network Meeting, On-site inspection SFDA ke Sarana Unit Pengolahan Ikan, Training Webinar Probiotik dengan University of Wisconsin Madison AS*.
- g. Pada forum bilateral, kerja sama dengan mitra yang ditindaklanjuti berupa kolaborasi BPOM dengan regulator mitra dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan melalui pertukaran informasi, pengembangan kapasitas regulator, dan upaya peningkatan perdagangan obat dan makanan, antara lain:

| No | Mitra Kerja Sama | Kegiatan Kolaborasi |
|----|--|--|
| 1 | Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia | A. Pertukaran informasi: 1. Pertemuan bilateral pimpinan TGA dan Kepala BPOM 2. Pertemuan pembahasan isu kontaminasi obat |

| No | Mitra Kerja Sama | Kegiatan Kolaborasi |
|----|--|--|
| | | <p>3. <i>Technical Discussion on Pharmacovigilance System</i></p> <p>B. Pengembangan kapasitas regulator obat dan makanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>RSP Regulatory Practice Workshop</i> di Canberra 2. <i>RSP Steering Committee and Forum</i> di Bangkok, Thailand 3. <i>RSP Online Workshop Series on Bioavailability and Bioequivalence – Regulatory considerations</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Introduction to Bioavailability/Bioequivalence</i> b) <i>Bioequivalence studies – Design and Conduct</i> c) <i>Bioanalytical validation and statistics</i> d) <i>Bioavailability/Bioequivalence - Regulatory challenges and assessment</i> |
| 2 | <p><i>Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang</i></p> | <p>A. Pertukaran informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertemuan teknis terkait persiapan bilateral meeting 17 April 2023 (Pertemuan Ibu Plt. Deputi 1 dengan PMDA Senior Executive Director, Dr. Shinobu Uzu) 2) <i>The 12th Asia Partnership Conference of Pharmaceutical Associations (APAC).</i> <p>B. Pengembangan kapasitas regulator obat dan makanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>PMDA-ATC with National Cancer Center MRCT Webinar 2023</i> 2) <i>PMDA-ATC with National Cancer Center MRCT Webinar 2023</i> 3) <i>PMDA-ATC Pharmacovigilance Webinar 2023</i> 4) <i>PMDA-ATC Chemistry, Manufacturing and Control (CMC) Review Webinar 2023 for The Indonesian FDA</i> 5) <i>Workshop Clinical Development Oversight of Investigational New Drug and Advanced Therapy Medicinal Product. Narasumber: Dr. Nishioka, Expert PMDA dengan topik: "International Regulation and best practices on Management of IND (small molecule)"</i> 6) <i>PMDA-ATC & U.S. FDA Pediatric Review Seminar 2023</i> 7) <i>Workshop on Risk Study Analysis of Elemental Impurities and Residual Solvents to Ensure the Quality of Drug Substances and Drug Products Narasumber : Dr. Yujiro KAMEYAMA, Expert PMDA</i> |

| No | Mitra Kerja Sama | Kegiatan Kolaborasi |
|----|---|---|
| | | 8) <i>PMDA-ATC Pharmaceuticals Review Webinar 2023</i> |
| 3 | <i>The Ministry of Food and Drug Safety of The Republic of Korea (MFDS)</i> | <p>A. Pertukaran Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi BPOM sebagai peserta pada Webinar <i>Digital Experiences on Food Safety Controls</i> oleh <i>Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)</i>; 2. Partisipasi BPOM sebagai peserta pada Webinar <i>IT Management System on Food Safety</i> oleh <i>MFDS</i>; 3. Keikutsertaan BPOM dalam forum regional <i>the Asia-Pacific Food Regulatory Authority Summit (APFRAS)</i> yang diinisiasi oleh <i>MFDS</i>; 4. Pertukaran hasil inspeksi sarana produksi pangan yang akan melakukan ekspor ke Korea antara Badan POM dengan <i>MFDS</i>. <p>B. Pengembangan Kapasitas Regulator Obat dan Makanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan Perwakilan Badan POM pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh <i>MFDS</i> sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Webinar Digital Experiences on Food Safety Controls</i>; • <i>Webinar Indonesia – Korea Medical Roadshow 2023 di Jakarta</i>; • <i>Global Bio-conference (GBC) 2023 dan the 8th National Control Laboratory Network Meeting</i>; • <i>Training Course on Biopharmaceutical Quality Management</i>; • <i>Webinar IT Management System on Food Safety</i>; • <i>Webinar for Drug Regulatory Framework in Indonesia</i>; • <i>The Asia-Pacific Food Regulatory Authority Summit (APFRAS)</i>. 2. <i>MFDS</i> memosisikan <i>review</i> BPOM terkait industri sebagai bagian dari referensi mereka dalam menilai keamanan makanan Indonesia yang diimpor ke Korea; 3. Pertemuan Plt. Deputi 1 dengan <i>Director General of the Biopharmaceuticals and Herbal Medicine Bureau, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)</i>, Mr. Shin Joon-su; |

| No | Mitra Kerja Sama | Kegiatan Kolaborasi |
|----|------------------|--|
| | | <p>4. Pertemuan Perwakilan BPOM dengan <i>Director Cosmetic Division</i> MFDS;</p> <p>5. BPOM berkolaborasi dengan MFDS dalam pengusulan identifikasi kerja sama terkait pendirian pabrik produk darah di Indonesia yang telah dilakukan oleh SK Plasma;</p> <p>6. MFDS menawarkan <i>IT Management System on Food Safety</i>. Sistem tersebut sebelumnya telah ditawarkan dan digunakan oleh Vietnam dan dikembangkan oleh MFDS. Melalui penerapan sistem tersebut, Indonesia dan Korea Selatan dapat memfasilitasi proses pertukaran informasi antar <i>contact point</i> di bidang <i>food safety</i>. Selain itu, kedua negara juga dapat bertukar peraturan, notifikasi maupun siaran pers. Sistem akan ditawarkan dalam bentuk <i>Official Development Assistance</i> (ODA), dan memerlukan waktu 2-3 tahun untuk dapat diterapkan.</p> <p>C. Upaya Fasilitasi Perdagangan:</p> <p>1. Keanggotaan BPOM pada APFRAS akan sangat bermanfaat khususnya dalam mendalami isu-isu terbaru mengenai regulatori pangan termasuk menyampaikan posisi BPOM agar nantinya dapat sejalan dengan aturan maupun kesepakatan internasional;</p> <p>2. MFDS menyetujui untuk membantu BPOM terkait kepatuhan regulasi untuk industri produk derivat plasma yang akan dibangun di Indonesia melalui penyusunan regulasi dan penjaminan mutu, khasiat dan keamanan;</p> <p>3. MFDS menawarkan <i>IT Management System on Food Safety</i>. Sistem tersebut sebelumnya telah ditawarkan dan digunakan oleh Vietnam dan dikembangkan oleh MFDS. Melalui penerapan sistem tersebut, Indonesia dan Korea Selatan dapat memfasilitasi proses pertukaran informasi antar <i>contact point</i> di bidang <i>food safety</i>. Selain itu, kedua negara juga dapat bertukar peraturan, notifikasi maupun siaran pers. Sistem akan ditawarkan dalam bentuk <i>Official Development Assistance</i> (ODA), dan memerlukan waktu 2-3 tahun untuk dapat diterapkan.</p> |

| No | Mitra Kerja Sama | Kegiatan Kolaborasi |
|----|---|--|
| 4 | Saudi Food and Drug Authority (SFDA) | 1) Pertemuan Bilateral antara Kepala BPOM dengan CEO SFDA membahas terkait ekspor pangan hewani Indonesia ke Arab Saudi untuk keperluan Haji dan Umroh 2) <i>Site visit</i> SFDA ke Badan POM sebagai <i>Competent Authority</i> ekspor pangan hewani ke Arab Saudi dan <i>on-site inspection</i> SFDA ke 6 (enam) Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang akan melakukan ekspor produk ikan ke Arab Saudi |
| 5 | National Medical Products Administration (NMPA) | Sebagai Implementasi dari <i>Plan of Action 2022-2023</i> antara BPOM dengan NMPA, telah dilakukan beberapa pertukaran informasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sharing information on risk mitigation of imported and exported APIs and finished products due to integrity of supply chain;</i> 2. <i>Sharing the query pathway of the list of APIs approved in China;</i> 3. <i>Exchange of GMP related regulatory policies on APIs in China;</i> 4. <i>Exchange of the regulatory regulations and policies for traditional medicine and cosmetics;</i> 5. <i>Holding a symposium on laboratory testing for COVID-19 vaccines as agreed by both sides.</i> |
| 6 | University of Wisconsin Madison Amerika Serikat | Pelaksanaan Webinar Pelatihan tentang Probiotik pada tanggal 27-28 November 2023 untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam regulasi, evaluasi produk, dan metode analisis probiotik. Kegiatan ini diikuti oleh 20 pegawai yang berasal dari berbagai unit di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, yang mewakili 7 wilayah regional laboratorium. |
| 7 | Michigan State University (MSU) | 1. Partisipasi BPOM pada <i>International Short Course in Food Safety</i> di East Lansing Amerika Serikat pada tanggal 23-20 Juli 2023. MSU memberikan sponsorship bagi dua peserta dari Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Hingga 2023, terdapat 18 pegawai BPOM yang disponsori untuk mengikuti pelatihan tersebut 2. Penandatanganan MoU antara BPOM dan MSU pada 5 Oktober 2023 |

| No | Mitra Kerja Sama | Kegiatan Kolaborasi |
|----|--|---|
| 8 | Pharmacy and Poisons Board (PPB) Kenya | <i>Learning visit</i> regulator PPB Kenya untuk mempelajari pemenuhan fungsi regulatori sesuai <i>WHO GBT assessment</i> . |
| 9 | Kementerian Kesehatan Palestina | Program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina dilaksanakan secara online di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina pada tanggal 7 – 9 November 2023. KSS ini bertujuan untuk melanjutkan komitmen Badan POM dalam mendukung pembentukan Otoritas Obat dan Makanan di Palestina yang independen, melalui peningkatan kapasitas regulator Obat dan Makanan Palestina. |

3.1.2. IKK 2: Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|---|--|--------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Realisasi | Capaian |
| a | b | c | d | $e=(d/c \times 100)$ | f | g | $h=(g/f \times 100)$ |
| Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global | Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral | 88 | 88,74 | 100,84% | 2.536.342 | 2.535.567 | 99,97% |

Realisasi IKK2 sebesar 88,74% dari target 88%, sehingga capaian indikator adalah 100,84% dengan kategori (Baik). Adapun pagu anggaran pada IKK2 adalah sebesar Rp. 2.536.342.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.535.567.829 atau 99,97% dengan kategori Baik.

Peran BPOM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara BPOM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan

beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK2, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait di BPOM, Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional, dll terkait penyampaian masukan dan posisi BPOM;
- b. Keikutsertaan dan partisipasi aktif BPOM dalam pertemuan dan konferensi internasional yang membahas regulasi dan pengawasan obat dan makanan.
- c. Penyusunan telaah, kajian serta usulan posisi BPOM terkait perundingan atau forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.

Pada tahun 2023, peran BPOM dalam forum bilateral, regional dan multilateral berupa intensifikasi/fasilitasi koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kertas posisi BPOM dalam perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra, sebagai berikut:

a) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri bilateral sebagai berikut:

| No | Mitra Kerja Sama | Isu |
|----|---|---|
| 1 | Australia Awards | Penjajakan dukungan beasiswa program <i>short course</i> dan pendidikan lanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi bagi pegawai BPOM |
| 2 | Center for Continuing Education, University of Sydney | Penjajakan <i>tailor-made training</i> untuk peningkatan kapasitas BPOM di bidang perencanaan dan penganggaran |
| 3 | South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) | Penyampaian Tanggapan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> BPOM dengan <i>South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA)</i> |
| 4 | Jordan FDA | Sharing informasi terkait Metode Analisa Laboratorium terkait prosedur pengecekan kontaminan EG dan DEG |
| 5 | Tanzania Medicines and Medical Devices Authority (TMDA) | <i>Study visit 2</i> (dua) regulator TMDA ke BPOM terkait pemeriksaan dan pengendalian ekspor dan impor obat di Indonesia |
| 6 | Harvard Kennedy School Amerika Serikat | Pembahasan potensi kerja sama bagi peningkatan kapasitas pegawai BPOM, khususnya di bidang <i>strategic management of regulatory and enforcement agencies</i> ; kebijakan publik dan negosiasi. |

| No | Mitra Kerja Sama | Isu |
|----|--|--|
| 7 | BioCubaFarma dan The Center for State Control of Medicines, Medical Equipment and Devices (CECMED), Kuba | <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan transfer teknologi produk bioteknologi obat kanker Theracim (Nimotuzumab) antara CIM dengan industri farmasi dalam negeri. • Pembahasan potensi kerja sama dengan CECMED Kuba terkait transfer teknologi produk biofarmasetikal ke Indonesia dan mendukung proses keanggotaan CECMED dalam organisasi internasional seperti <i>Pharmaceutical Inspection Convention</i> (PIC/s). |
| 8 | Centro de Inmunologia Molecular (CIM), Kuba | BPOM akan melakukan pendampingan dalam proses transfer teknologi produk bioteknologi obat kanker Theracim (Nimotuzumab) dari CIM Kuba kepada Industri Farmasi dalam negeri, termasuk pembuatan Drug Substance (DS) dan Drug Product (DP) sehingga dapat mendukung ketersediaan produk dalam negeri. |
| 9 | Michigan State University (MSU) Amerika Serikat | Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) antara BPOM dengan Michigan State University terkait pengembangan kapasitas SDM di bidang keamanan pangan |
| 10 | Neogen | Pembahasan dan kunjungan ke Neogen terkait inovasi test kit sebagai alat diagnostik keamanan pangan. |
| 11 | United States of Pharmacopoeia (USP) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi BPOM pada <i>USP Workshop on Nitrosamines Impurities</i> pada tanggal 30 Agustus 2023. 2. Partisipasi BPOM pada <i>Managing Your Risk with USP Workshop</i> pada tanggal 2 November 2023. 3. Pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2023 membahas rencana kolaborasi dengan USP di bidang peningkatan kapasitas. 4. <i>Virtual meeting</i> pada 1 Desember 2023 membahas dukungan USP untuk pengajuan WHO Listed Authority Badan POM. |

b) Perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra, sebagai berikut:

| No | CEPA | Working Group | Isu yang dibahas |
|----|--|---|---|
| 1 | <i>Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I EU-CEPA)</i> | <i>Rules of Origin (ROO) dan Product Specific Rules (PSR)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian posisi tarif produk binaan BPOM, khususnya pada kategori pos tariff 3004 (<i>Medicaments</i>) semula <i>Change of Tariff Sub-heading</i> (CTSH) kemudian diusulkan menjadi <i>Change of Tariff Heading</i> dan 3006 (<i>Pharmaceutical goods; waste pharmaceuticals</i>) semula CTSH kemudian diusulkan menjadi <i>Wholly Obtained</i>. (Kertas posisi BPOM untuk Product Specific Rules (PSR) IEU-CEPA pada tanggal 4 Februari 2023) • Penyampaian tanggapan BPOM terhadap definisi <i>biotechnological processing</i> sebagai salah satu <i>product specific rules</i> dan konfirmasi posisi <i>rules</i> produk binaan BPOM. Terkait posisi <i>rules</i>, Badan POM menyetujui <i>grouping rules</i> untuk semua produk binaan Badan POM dengan kriteria CTSH, kecuali <i>pharmaceutical waste</i> (Kertas Posisi BPOM untuk Product Specific Rules (PSR) IEU-CEPA adalah pada tanggal 12 Mei 2023) |
| | | <i>Intellectual Property Rights (IPR)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Usulan klausul dari EU mengenai perpanjangan jangka waktu paten pada <i>Article X.41 Extension of the Period of Protection Conferred by a Patent on Medicinal Products</i>; • Usulan klausul dari EU mengenai kerahasiaan data registrasi obat baru pada <i>Article X.44 Protection of Data Submitted to Obtain an</i> |

| No | CEPA | Working Group | Isu yang dibahas |
|----|------|--|---|
| | | | <p><i>Authorization to Put a Medicinal Product on the Market.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • BPOM tidak menyetujui usulan artikel X.41 dan X.44 paragraf 2, 3, dan 4. BPOM mengajukan usulan draft text artikel X.41 dan, X.44 paragraf 2, 3, dan 4 kepada DJKI untuk disampaikan ke EU. <p>(Kertas Posisi BPOM untuk WG Intellectual Property IEU-CEPA putaran ke 15 tanggal 5 Mei 2023; dan Kertas Posisi BPOM pada WG IPR IEU-CEPA pada tanggal 17 Juli 2023)</p> |
| | | <p><i>Trade in Good (TiG)</i></p> | <p><i>Article X.13 Origin Marking</i> mengenai penggunaan atau pencantuman “Made in EU” yang tetap harus memenuhi persyaratan penandaan yang diatur dalam aturan dan regulasi Indonesia khususnya BPOM untuk komoditi Obat dan Makanan. Artikel ini telah mencapai kesepakatan pada putaran ke-15 12-13 Juli 2023 lalu.</p> |
| | | <p><i>Technical Barrier to Trade (TBT)</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menyepakati <i>Artikel X-8 Marking and labelling.</i> • Pembahasan <i>Annex Supplier Declaration of Conformity.</i> • Pembahasan usulan draft text EU yang berarti Pemberlakuan persyaratan untuk pengujian atau sertifikasi pihak ketiga yang diwajibkan untuk bidang produk yang ditentukan dalam Lampiran ini selama memenuhi <i>legitimate objectives.</i> |

| No | CEPA | Working Group | Isu yang dibahas |
|----|-----------------------|--|--|
| | | <i>Energy and Raw Material (ERM)</i> | Penyampaian Masukan terkait Definisi Raw Materials pada <i>Draft Text Working Group Energy and Raw Material</i> dimana BPOM mengusulkan agar <i>pharmaceutical products</i> dapat dikecualikan pada definisi <i>raw material</i> berdasarkan justifikasi. (Kertas Posisi terkait Definisi Raw Materials pada Draft Text Working Group Energy and Raw Material IEU-CEPA pada tanggal 7 September 2023) |
| 2 | Indonesia-Canada CEPA | <i>National Treatment and Market Access (NTMA)</i> | Penyampaian posisi pos tarif komoditi binaan BPOM sebanyak 135 pos tarif dan penentuan posisi BPOM terhadap rekomendasi <i>Initial Offer list</i> ICACEPA. |
| | | <i>Sanitary and Phytosanitary (SPS)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Pada Article X.3 Scope, Indonesia mengusulkan paragraf tambahan agar tiap pihak menyediakan technical assistance dan capacity building untuk menjembatani gap terkait persyaratan dan prosedur di kedua negara. Namun, usulan ini belum disetujui oleh Kanada. • Untuk Article X.17 Dispute Settlement, Kanada menginginkan pencantuman Article Dispute Settlement pada Chapter SPS yang mengacu pada Chapter Dispute Settlement. Namun, Indonesia tetap tidak berkenan memasukkan Article Dispute Settlement dalam Chapter SPS. Diharapkan isu yang timbul dalam kerja sama agar diselesaikan melalui technical consultation atau WTO Committee. |

| No | CEPA | Working Group | Isu yang dibahas |
|----|------|---|--|
| | | IPR | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan pertanyaan dari pihak Kanada mengenai implementasi Permenkes 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat. • Pembahasan <i>Article XX.15: Protection of Undisclosed Test or Other Data for Pharmaceutical Products.</i> (Kertas Posisi BPOM pada WG IPR ICA-CEPA pada tanggal 17 Juli 2023) |
| | | TBT/ <i>Standards, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures</i> (STRACAP) | <ul style="list-style-type: none"> • Pada article X.5 Technical Regulations. Kanada mengajukan 5 proposal untuk menggabungkan pendekatan/ teks Kanada dan Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mempertimbangkan usulan-usulan ini dan akan memberikan reaksi yang sama pada Putaran 7. Semua tanda kurung dihilangkan pada X.5 (5) sehingga ketentuan/paragraf kini disetujui sepenuhnya. • Pada article X.6 conformity assessment, Para Pihak berdiskusi dengan baik dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai posisi masing-masing. Kanada dan Indonesia menyetujui sebagian X.6 (12). Indonesia akan memberikan usulan mengenai mekanisme untuk memfasilitasi penerimaan hasil penilaian kesesuaian. • Para article X.7 Transparency. Indonesia menyetujui sebagian besar teks tersebut dengan |

| No | CEPA | Working Group | Isu yang dibahas |
|----|------|------------------------------|---|
| | | | <p>pertimbangan bahwa teks dalam RCEP –STRACAP Bab – Pasal 11.6 lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai bahasa yang diusulkan untuk [CA 15] untuk dipertimbangkan Kanada.</p> |
| | | <i>E-commerce (ECOM)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai pembelian dan penjualan barang dan jasa secara online, termasuk pertukaran informasi. BPOM fokus pada pengembangan penjualan produk Obat dan Makanan yang diperdagangkan secara digital melalui <i>platform e-commerce</i>. • Pada Article XX.3: Cooperation, Indonesia mengusulkan pembahasan <i>cyber security</i> menjadi <i>article</i> sendiri dengan mempertimbangkan dimana Indonesia ingin mendorong kemajuan pada bidang cyber security. Usulan tersebut diterima oleh Canada dan diusulkan menjadi Article XX.18 |
| | | <i>Rules of Origin (ROO)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kanada membagikan non-paper tambahan kepada Indonesia mengenai Focused Value sebelum putaran keenam, dan Indonesia berkomitmen untuk meninjau dan memberikan komentar pada putaran berikutnya. Namun, Indonesia mengusulkan untuk menerapkan 3 (tiga) aturan PSR Change in Tariff Classification (CTC), <i>Qualifying Value Content (QVC)</i>, and <i>Focused Value</i>. |

| No | CEPA | Working Group | Isu yang dibahas |
|----|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Kanada memperkenalkan perhitungan Focused Value sebagai alternatif dari <i>Qualifying Value Content</i> (QVC) yang merupakan hal baru bagi Indonesia sehingga Indonesia meminta waktu untuk memahami termasuk tantangan dalam penerapannya pada saat verifikasi impotir di lapangan bagi Bea Cukai. • Pada bagian Definitions, kedua pihak setuju untuk memindahkan ke gabungan Chapter ROO-OP. Selanjutnya, pada Article X.9 Verification of Origin, Kanada akan membagikan teks usulannya mengenai suppliers. Pada Article X.15 Confidentiality, Kanada telah menghapus usulan awalnya dan akan mengusulkan dua ketentuan alternatif. • Pada pembahasan usulan rules Indonesia, Badan POM telah menyampaikan masukan untuk rules produk binaan Badan POM dan telah disampaikan kepada Kanada |
| 4 | IEFTA CEPA | <i>Cooperation and Capacity Building (CCB)</i> | Penyusunan <i>roadmap</i> implementasi program tahun 2023. |
| | | PSR | Terkait dengan BPOM, pembahasan difokuskan pada <i>HS Code</i> pada Chapter 30 (CTH) yang beririsan dengan Kementerian Kesehatan. |
| 5 | Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive | Penetapan Rancangan Peraturan Menteri | Dukungan Kepala BPOM pada Penyusunan dan Penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam Kerangka |

| No | CEPA | Working Group | Isu yang dibahas |
|----|--|---|---|
| | Economic Partnership Agreement (IUAE CEPA) | Keuangan (PMK) tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Kerangka IUAE-CEPA | Indonesia- United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE CEPA) |
| 6 | Indonesia-Mauritus PTA | <i>Market Access</i> | BPOM telah menyampaikan Masukan Usulan Pos Tarif pada <i>Initial Offer List</i> Pos Tarif Produk Binaan BPOM. |

- c) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri seperti, Pharmaceutical Poison Board (PPB) Kenya, Harvard Medical School, CoRE Duke-NUS Singapura, Pertemuan dengan Austrade/Swisse, dll;
- d) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral antara lain Pertemuan teknis dengan SFDA mengenai ekspor pangan dan rencana kunjungan Tim Inspeksi SFDA ke Indonesia, Pertemuan *Task Force ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework Agreement*, Pertemuan ASEAN *Health Cluster (AHC) 4: Food Safety*, Persiapan BPOM menjadi WHO *Listed Authority (WLA)*, Persiapan Indonesia sebagai Tuan Rumah Pertemuan SEARN *Assembly*, dll;
- e) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral antara lain bahan kerja sama pada forum Perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I EU-CEPA), Penyampaian Posisi BPOM pada Product Specific Rules (PSR) Working Group Rules of Origin (WG ROO) untuk Perundingan Putaran Kelima Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Partisipasi BPOM Pada WG IPR IEU-CEPA Putaran ke-15, Initial Offer dalam kerangka Indonesia EAEU Free Trade Agreement (IEAEU-FTA), dll;
- f) Penyusunan dan penyampaian posisi BPOM pada forum kerja sama regional pada Pertemuan APRF Agreement ke-5, ATF-JCC ke-25, ATIGA *Upgrade Trade Negotiating Committee*, ASEAN Caucus of the 1st ACFTA WG SPS Meeting, ASW (ASEAN Single Window) Symposium Meeting, ARASFF (ASEAN Rapid

Alert System for Food and Feed) Meeting, The 35th Meeting of PPWG, The 59th Meeting of the ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ), Senior Official Meeting on Health Development ke-17, Pertemuan 33rd TMHS PWG, ASEAN Consultative Meeting on One Health Initiative, ASCP dan AC-SPS, AEM ke 55, SOM AMAF ke-44, ATIGA TNC ke-5, Workshop on the application of the Codex General Standard for Food Additives (GSFA) to facilitate harmonisation of ASEAN MLs of Food Additives, ACAFTA SWG STRACAP, Intersesi ACCSQ, Sidang AFTLC ke-23, Sidang AHC4 ke-7, Pertemuan ACCSQ PPWG Meeting, Pertemuan ACCSQ TMHS PWG Meeting, Pertemuan 4th ACFTA WG TIG Meeting, Pertemuan 6th ASEAN Canada SWG SPS Meeting, dll;

g) Penyusunan dan penyampaian posisi BPOM pada forum kerja sama multilateral dalam bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

| No | Forum/Pertemuan | Isu yang dibahas |
|----|---|---|
| 1 | WHO <i>Executive Board</i> ke-152 dan <i>World Health Assembly</i> (WHA) ke-76 | <ul style="list-style-type: none"> Perkembangan pengawasan MSM SFMP di Indonesia dan upaya yang telah dilakukan Indonesia pada kasus EG/DEG. Pengawasan perkembangan isu EG/DEG melalui <i>sharing information</i> dan <i>experiences</i>. |
| 2 | WHO <i>Steering Committee MSM on SFMP</i> , dan <i>Meeting of MSM on SFMP</i> | <ul style="list-style-type: none"> Perkembangan pengawasan SFMP di negara-negara anggota, baik di pasar formal (industri, fasilitas kesehatan) maupun di pasar informal (<i>online platform</i>, toko obat, warung, dll). Pengembangan kapasitas regulator seluruh negara anggota di bidang pengawasan SFMP. Upaya-upaya yang telah dilakukan negara-negara anggota pada kasus EG/DEG. |
| 3 | WHO SEARN <i>Steering Group</i> dan <i>Working Group</i> , serta SEARN <i>Assembly 2023</i> | Perkembangan terhadap isu yang disampaikan oleh masing-masing <i>Chair of Working Groups</i> . |
| 4 | SEAR-ITAG | <ul style="list-style-type: none"> <i>Progress</i> dari implementasi program Imunisasi Dasar Nasional yang menjadi dasar bagi rencana implementasi vaksin regional di Asia Tenggara pada tahun 2024-2026. Revitalisasi dari layanan imunisasi rutin serta pengawasan yang dilakukan terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan menggunakan vaksin. |

| No | Forum/Pertemuan | Isu yang dibahas |
|----|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan produksi dan distribusi vaksin COVID-19 di negara-negara kawasan Asia Tenggara, serta rencana mengintegrasikan vaksinasi COVID-19 dengan imunisasi rutin. |

h) Penyusunan dan penyampaian posisi BPOM pada forum kerja sama multilateral dalam bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

| No | Forum/Pertemuan | Isu yang dibahas |
|----|---|--|
| 1 | Sidang Reguler Komite <i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS) WTO | <ul style="list-style-type: none"> • Kandungan Timbal (Pb) pada produk Nanas Kaleng yang diekspor ke Malaysia • Penarikan produk Mi Instan asal Indonesia yang dianggap mengandung residu pestisida Etilen Oksida (EtO) di Singapura, Hongkong, Taiwan dan Malaysia • Hambatan Ekspor Produk <i>Composite</i> oleh Uni Eropa |
| 2 | Sidang Reguler Komite <i>Technical Barriers to Trade</i> (TBT) WTO | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 33/2014 mengenai Jaminan Produk Halal. Beberapa <i>concern</i> yang harus dibahas antara lain mengenai kepastian lembaga sertifikasi halal asing agar diizinkan untuk mensertifikasi produk jadi, kode HS untuk produk yang memerlukan sertifikasi halal, serta fleksibilitas untuk pengakuan lembaga sertifikasi Halal luar negeri dan penerimaan sertifikat Halal luar negeri. • Rancangan Regulasi Uni Eropa mengenai <i>Maximum Residue Levels</i> (MRLs) untuk zat <i>clothianidin</i> dan <i>thiamethoxam</i> yang akan menimbulkan ketidakpastian dan membuat ekspor dari Indonesia menjadi kurang menarik karena potensi penolakan menjadi lebih tinggi. |
| 3 | Penguatan Kelembagaan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) / WTO <i>Trade Facilitation Agreement</i> (TFA) | <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kepmenko Bidang Perekonomian Nomor 168 Tahun 2023 tentang KNFP sebagai pengganti Kepmenko Bidang Perekonomian Nomor 199 Tahun 2018 Jo Nomor 284 Tahun 2018 • Penyusunan Konsep Revisi Kepmendag Nomor 406 Tahun 2020 tentang Sekretariat KNFP • Pembahasan Persiapan Launching Sistem <i>Enquiry Points</i> • Identifikasi implementasi TFA WTO |

| No | Forum/Pertemuan | Isu yang dibahas |
|----|--|---|
| 4 | Deklarasi SPS pada Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12 | <p>Pertemuan membahas 5 grup agenda sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Group 1: How to facilitate global food security and more sustainable food (Art 3 SPS Agreement).</i> <i>Group 2: How to Support basing SPS measures on scientific evidence and principles (Art. 2, Art.3, Art.4, Art. 5, Art. 6 SPS Agreement).</i> <i>Group 3: How to enhance the safe international trade in food, animals and plants and products thereof through the adaptation of SPS measures to regional conditions (Art.6 SPS Agreement).</i> <i>Group 4: How to encourage cooperation with observer organisations that support the work of the SPS committee and the international standard setting bodies through technical exchanges and assistance in the context of this work programmed (Art. 9 SPS Agreement).</i> <i>Group 5: How to increase participation of and support for the special needs of developing and least developed country Members in the development and application of SPS Measures. (Art. 9 dan 10 SPS Agreement).</i> |
| 5 | Pertemuan <i>Trade Policy Review</i> (TPR) ke-8 Malaysia | <ul style="list-style-type: none"> • Informasi terkait hubungan dagang Indonesia-Malaysia • Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di Malaysia untuk produk Obat dan Makanan |
| 6 | Pertemuan <i>Trade Policy Review</i> (TPR) ke-15 Uni Eropa | <ul style="list-style-type: none"> • Informasi terkait hubungan dagang Indonesia dengan Uni Eropa • Kebijakan/peraturan Uni Eropa yang telah dan/atau berpotensi menghambat perdagangan barang, jasa dan investasi Indonesia • Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di Uni Eropa |
| 7 | Pertemuan <i>Trade Policy Review</i> (TPR) ke-9 Hongkong, China dan TPR ke-6 Chile | <ul style="list-style-type: none"> • Informasi perdagangan Indonesia dengan Hongkong, China dan Chile • Penarikan produk Mi Instan asal Indonesia yang dianggap mengandung residu pestisida Etilen Oksida (EtO) di Hongkong |

Selain itu, penyusunan dan penyampaian posisi Indonesia dalam forum perdagangan juga terwujud pada Sidang ke-43 *Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses* (CCNFSDU) dan Sidang ke-53 *Codex Committee*

on Food Additives (CCFA), Sidang ke-16 Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF), Sidang ke-47 Codex Committee on Food Labelling (CCFL), Codex Alimentarius Committee (CAC) Meeting, Kunjungan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Associate Industrial Development Expert ke Badan POM, dll.

3.2 Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

| SK2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas | |
|--|---|
| IKK 3 | Indeks kepuasan media |
| IKK 4 | Indeks opini publik BPOM |
| IKK 5 | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas |

3.2.1 IKK 3: Indeks kepuasan media

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|---|-----------------------|--------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Realisasi | Capaian |
| a | b | c | d | $e=(d/cx100)$ | F | g | $h=(g/fx100)$ |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas | Indeks kepuasan media | 77 | 77,13 | 100,17% | 405.639 | 403.757 | 99,54% |

Realisasi Indikator kinerja yang ketiga, yaitu “Indeks Kepuasan Media” pada Tahun 2023 adalah 77,13% dari target sebesar 77%, sehingga capaian indikator adalah 100,17% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Pada tahun 2023, pagu anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp405.639.500,- dengan realisasi sebesar Rp403.757.787,- (99,54%)

Indikator kinerja “Indeks Kepuasan Media” diperoleh melalui pengukuran yang dilakukan di akhir tahun 2023. Survei kepuasan media yang dilakukan tidak hanya

untuk mengukur nilai indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga ditujukan untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM melalui kegiatan liputan/permintaan informasi/wawancara/*talkshow*.

Pengukuran Indeks dilakukan dengan 9 (sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan indikator tersebut yaitu sistem, mekanisme, dan prosedur; persyaratan pelayanan; biaya/tarif; waktu; produk; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana prasarana; serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Hal ini juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2022, karena pada tahun 2022, realisasi indikator ini hanya 73,55 sehingga terdapat kenaikan sebesar 3,58 poin. Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan liputan, serta pemenuhan terhadap permintaan informasi/wawancara/*talkshow* yang dilakukan oleh Humas BPOM setara dengan pelayanan dari instansi lain;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu kegiatan BPOM yang melibatkan media;
- c. Perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan media; dan
- d. Kemudahan memahami informasi yang disampaikan BPOM (melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos).

Beberapa upaya yang telah dilakukan selama tahun 2023 untuk menunjang pencapaian indikator, di antaranya:

- a. Permohonan permintaan informasi/wawancara/*talkshow* yang diterima segera ditindaklanjuti dengan penyiapan konsep jawaban dan dilaporkan ke pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut;
- b. Secara aktif menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis ter-*update* yang dilakukan BPOM melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos kepada media; dan

- c. Melakukan konferensi pers/*doorstop* sebagai ruang komunikasi bagi media dan BPOM dalam membahas isu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan ini, dapat disediakan sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan BPOM untuk penjelasan mengenai isu tersebut; dan
- d. Permohonan wawancara yang diajukan terkait topik obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat (viral) direspons dalam bentuk pelaksanaan konferensi pers/*doorstop*/wawancara/jawaban tertulis agar mempercepat penyampaian informasi kepada media.
- e. Untuk permintaan informasi secara umum dari media yang jawabannya telah tersedia didatabase atau di siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos dapat segera direspons.

Berdasarkan analisis hasil survei dari setiap komponen, terdapat beberapa saran dan masukan perbaikan dari responden jurnalis yang perlu menjadi prioritas perbaikan layanan kehumasan BPOM, yaitu:

- a. Mempermudah akses wawancara dengan narasumber, terutama dengan Eselon I atau Pimpinan BPOM;
- b. Memberikan nama narasumber yang dapat dikutip sebagai referensi pemberitaan jurnalis;
- c. Meningkatkan kualitas dari narasumber BPOM, yaitu dari ketersediaan jadwal yang jelas, kesesuaian pemenuhan waktu wawancara yang disepakati, dan memperbanyak opsi narasumber; dan
- d. Memperbaiki proses pencatatan data yang terkait dengan obat, makanan, suplemen kesehatan, makanan, dan informasi lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik dalam memenuhi permintaan data dan jawaban dari media.

3.2.3 IKK 4: Indeks Opini Publik

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|---|--------------------------|--------|-----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | b | c | d | a | b | c | d |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas | Indeks opini publik BPOM | 85 | 85,04 | 100,05 % | 1.248.272 | 1.233.658. | 98,83% |

Realisasi Indeks Opini Publik BPOM pada tahun 2023 adalah sebesar 85,1 dari target sebesar 85, sehingga capaian indikator adalah 107,29% dengan kategori “Baik” (Hijau).

Indeks opini diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik Masyarakat terhadap BPOM menggunakan pendekatan dan metodologi *Quantitative Research*. Pada survei tahun 2023 dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1.600 responden, jumlah responden tetap sama dengan tahun 2022. Hal ini karena untuk memastikan konsistensi hasil indeks survei supaya dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Alasan kedua, survei opini publik pada 2022 memiliki *margin error* 2,45%. Artinya, ada sekitar 39 dari 1.600 responden yang merupakan kesalahan dari hasil sampling, kesalahan tersebut masih bisa ditoleransi. Sampel untuk survei tahun 2023 akan dihitung dengan mengacu pada Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020.

Indeks Opini Publik BPOM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: BPOM melakukan pengawasan *pre* dan *post-market* serta komunikasi, informasi, dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: BPOM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: BPOM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.

4. Aspek Penindakan: BPOM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: BPOM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan.
6. Aspek Isu Obat dan Makanan: BPOM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan di tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- a. Meningkatkan publikasi informasi publik BPOM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat. Informasi yang tepat dan terpercaya dari BPOM akan membentuk kepercayaan masyarakat yang baik dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap BPOM.
- b. Mengembangkan berbagai inovasi terkait dengan publikasi informasi kepada masyarakat dengan membuat berbagai jenis konten yang disesuaikan dengan *public needs* seperti konten *video/reels*.
- c. Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.
- d. Bersinergi dengan lintas sektor terutama kementerian, lembaga, institusi penelitian, pemerintah daerah maupun tokoh yang berpengaruh untuk bersama-sama mendukung pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- e. Menyebarkan informasi kekinian terkait obat dan makanan, dan kinerja BPOM dalam bentuk audio visual seperti *podcast* melalui kanal media sosial BPOM.

3.2.3 IKK 5: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|---|---|--------|-----------|---------|---------------------------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | b | c | d | a | b | c | D |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas | 3,87 | 3,89 | 100,52% | 182.790 | 181.328 | 99,20% |

Realisasi Indikator kinerja yang kelima, yaitu “Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah 3,89 dari target Tahun 2023 sebesar 3,87, sehingga capaian indikator adalah 100,52% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

IKK 5 ditujukan untuk mengukur kepuasan internal terhadap layanan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Biro Kerja Sama dan Humas terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Humas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Biro Kerja Sama dan Humas. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas.

Survey mengukur kepuasan internal terhadap layanan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang mencakup:

1. Layanan Penyusunan MoU/PKS dalam negeri
2. Layanan Penyusunan MoU/PKS luar negeri
3. Layanan Penyusunan Bahan Kerja Sama Luar Negeri (Kertas Posisi, *Talking Point*, dll)
4. Layanan Administrasi/Persetujuan dan Exit Permit Perjalanan Dinas Luar Negeri
5. Layanan Export Consultation Desk (ECD)
6. Layanan Monitoring Pemberitaan terkait Obat dan Makanan
7. Layanan Permintaan Peliputan Kegiatan Strategis BPOM
8. Layanan Publikasi Kegiatan Strategis BPOM pada Media Sosial Resmi BPOM, dan
9. Layanan Permohonan Wawancara dari Media

Berdasarkan nilai IPP, diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Kerja Sama dan Humas sebesar 3,87, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang pencapaian IKK5, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri.
- b. Sosialisasi Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Pedoman Penilaian Efektivitas Kerja Sama UPT;
- c. Asistensi dan pembinaan kerja sama dalam negeri;
- d. Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis BPOM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BPOM, terutama yang melibatkan Kepala BPOM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, media sosial official official BPOM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarluaskan ke media.
- e. Monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri melalui subsite SIKES.
- f. Pelaksanaan inovasi sarana pelayanan publik Biro Kerja Sama dan Humas melalui kegiatan KONEKSI (Konsultasi, mONitoring, dan Evaluasi Kerja Sama

dalam negeri). KONEKSI diadakan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis secara daring melalui aplikasi Zoom;

- g. Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang obat dan makanan di media cetak, elektronik dan *online* secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis BPOM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi *early warning system* mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari BPOM.
- h. Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di BPOM melalui berbagai akun *official* media sosial BPOM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.
- i. Pemenuhan permohonan informasi/wawancara/talkshow dari media yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
- j. Peningkatan kompetensi petugas kehumasan di lingkungan settama melalui Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM Camp) dan *Meet the Expert*.
- k. Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Perjalanan Dinas Luar Negeri tahun 2023.

3.3 Sasaran Kegiatan 3. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM

SK3. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM

| | |
|-------|---|
| IKK 6 | Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu |
|-------|---|

3.3.1 IKK 6: Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|--|---|--------|-----------|---------|---------------------------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | B | c | d | a | b | c | d |
| Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM | Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu | 84 | 87,74 | 116,98% | 289.064 | 288.901 | 99,94% |

Realisasi Indikator kinerja yang keenam, yaitu “Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu” di Tahun 2023 adalah 87,74% dari target Tahun 2023 sebesar 84%, sehingga capaian indikator adalah 116,98% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Indikator Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator level internal process untuk melihat sejauh mana dokumen kerja sama yang berupa kajian kerja sama, dokumen kertas posisi, penjajakan kerja sama (talking point, statement), perjanjian kerja sama yang difasilitasi oleh Biro Kerja Sama dan Humas dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan SLA di SOP Makro.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK6, antara lain:

- a. Melakukan tinjau ulang SOP disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pembahasan bersama, dll.
- c. Menyusun pedoman kerja sama dan pengembangan aplikasi terkait.

Dalam forum bilateral, telah dilaksanakan penandatanganan MOU dengan Mitra di luar Negeri, seperti antara Badan POM dan Iran FDA mengenai Kerja Sama Regulasi di Bidang Produk Farmasi, Produk Biologi, Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan serta antara BPOM dengan AIFAESA Timor Leste, Penandatanganan MOU antara BPOM dengan *Pharmacy and Poisons Board* (PPB) Kenya, *Autoridade Nacional Reguladora de Medicamento* (ANARME) Mozambik, *Michigan States University*. Rincian dokumen kerja sama dalam negeri yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 sebagai berikut:

| NO | DOKUMEN KERJA SAMA DALAM NEGERI |
|----|---|
| 1 | PKS antara Badan POM dengan Lemdiklat POLRI |
| 2 | MOU antara Badan POM dengan Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) |
| 3 | MOU antara Badan POM dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 4 | PKS antara Badan POM dengan Badan Pusat Statistik |
| 5 | PKS antara Badan POM dengan TNI Angkatan Laut |
| 6 | MOU antara Badan POM dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) |

| NO | DOKUMEN KERJA SAMA DALAM NEGERI |
|-----------|--|
| 7 | PKS antara Badan POM dengan Palang Merah Indonesia |
| 8 | PKS antara Badan POM dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 9 | MOU antara Badan POM dengan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) |
| 10 | PKS antara Badan POM dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian |
| 11 | PKS antara Badan POM dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) |
| 12 | PKS antara Badan POM dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) |
| 13 | MOU antara Badan POM dengan Universitas Sriwijaya |
| 14 | MOU antara Badan POM dengan Universitas Jenderal Sudirman |
| 15 | MOU antara Badan POM dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
| 16 | MOU antara Badan POM dengan Wirawati Catur Panca |
| 17 | PKS antara Badan POM dengan Wirawati Catur Panca |
| 18 | MOU antara Badan POM dengan Badan Intelijen Nasional |
| 19 | PKS antara Badan POM dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
| 20 | MOU antara Badan POM dengan 8 Asosiasi dan PT. Murindra Karya Lestari |
| 21 | MOU antara Badan POM dengan 8 Asosiasi dan Kelompok Tani Hutan Flora Mangrove |
| 22 | MOU antara Badan POM dengan Universitas Sahid |
| 23 | MOU antara Badan POM dengan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 24 | MOU antara Badan POM dengan Pondok Pesantren Amanatul Ummah |
| 25 | MOU antara Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan POM dan BAPANAS |
| 26 | PKS antara Badan POM dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) |
| 27 | MOU antara Badan POM dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |

3.4 Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

SK4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

| | |
|-------|---|
| IKK 7 | Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan |
|-------|---|

3.4.1 IKK 7: Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|--|---|--------|-----------|---------|---------------------------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | b | c | d | a | b | c | d |
| Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional | Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan | 2 | 2 | 100% | 383.470 | 383.321 | 99,96% |

Realisasi Indikator kinerja yang ketujuh, yaitu “Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah 2 Negara dari target Tahun 2023 sebesar 2 Negara, sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Indikator Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan merupakan indikator level internal process untuk melihat Negara Selatan-selatan yang merupakan negara berkembang diberikan kontribusi oleh Badan POM dalam pembangunan nasional. Ruang lingkup indikator ini antara lain:

1. Penyelenggaraan Knowledge Sharing;
2. *Business Meeting*; atau
3. Kunjungan Kerja.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK7, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait di BPOM dalam penyusunan materi peningkatan kapasitas untuk negara penerima KSS BPOM;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas untuk negara penerima KSS BPOM.
- c. Penyusunan telaah, kajian serta usulan/rekomendasi terkait kerja sama selatan-selatan.

Kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

Timor-Leste

1. Sebagaimana diketahui, dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), Pemerintah Indonesia melalui Badan POM berencana memberikan hibah berupa alat uji keamanan pangan (alat laboratorium dan mobil laboratorium keliling) serta bimbingan teknis/pelatihan personel laboratorium kepada Pemerintah Timor-Leste melalui AIFAESA, I.P pada tahun 2024 dengan dukungan anggaran dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kementerian Keuangan.
2. Untuk itu, sebelum pelaksanaan proses hibah dimaksud maka perlu dilakukan survei lapangan guna melihat langsung kondisi gedung calon laboratorium milik AIFAESA, I.P. Pada tanggal 31 Juli – 2 Agustus 2023, Delegasi RI (Delri) yang terdiri dari perwakilan Badan POM yaitu Tim dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) dan Biro Kerja Sama dan Humas, bersama dengan perwakilan dari Kemlu yaitu Direktorat Asia Tenggara dan Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional, telah melaksanakan kunjungan lapangan ke AIFAESA, I.P di Dili, TimorLeste.
3. Kunjungan ini dalam rangka melakukan identifikasi dan survei kesiapan gedung laboratorium AIFAESA, I.P dalam rangka rencana pemberian hibah alat uji keamanan pangan dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Timor-Leste.

Palestina

1. Badan POM telah menyelenggarakan program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina secara online di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina pada tanggal 7 – 9 November 2023. KSS ini bertujuan untuk melanjutkan

komitmen Badan POM dalam mendukung pembentukan Otoritas Obat dan Makanan di Palestina yang independen, melalui peningkatan kapasitas regulator Obat dan Makanan Palestina.

2. Sejak tahun 2018, Kementerian Kesehatan Palestina telah memperoleh materi pelatihan yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Regulasi dan persyaratan kriteria GMP untuk membangun dasar regulasi dan kapasitas produksi yang kuat.
 - b. Pengawasan distribusi dan peredaran, untuk memastikan distribusi yang aman dan peredaran yang efektif.
 - c. Administrasi dan sistem informasi, untuk mendukung administrasi dan pengelolaan data untuk memastikan efisiensi dan kecepatan dalam proses registrasi.
3. Peserta Palestina menyampaikan dapat memahami materi pelatihan karena menurut mereka narasumber BPOM memiliki pengetahuan baik dan menyampaikan materi dengan jelas. Peserta Palestina aktif berdiskusi dan berinteraksi pada materi obat bahan alam dan suplemen kesehatan terutama pada pembahasan regulasi dan persyaratan pendaftaran.
4. Kedepannya, Peserta Palestina berharap BPOM dapat memberikan pelatihan secara offline/luring agar peserta dapat berdiskusi secara mendalam dalam kelompok kecil dan melakukan simulasi.

3.5 Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

SK5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

| | |
|--------|--|
| IKK 8 | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media |
| IKK 9 | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti |
| IKK 10 | Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting |

3.5.1. IKK 8: Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|---|---|--------|-----------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | b | c | d | a | b | c | d |
| Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | 99,85 | 99,25 | 99,40% | 1.765.455 | 1.764.401 | 99,94 |

Realisasi Indikator kinerja yang kedelapan, yaitu “Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media” pada Tahun 2023 mencapai 99,25% atau sedikit lebih rendah dari target sebesar 99,85%, sehingga capaian indikator adalah 99,40% dengan kriteria “Cukup” (Kuning).

Pada Triwulan 4 Tahun 2023, apabila hanya memperhitungkan akumulasi pemberitaan dari bulan Oktober-Desember, target tersebut telah mencapai target yang ditentukan. Namun, mengingat perhitungan Indikator ini berdasarkan akumulasi pemberitaan dari Januari-Desember, maka target sebesar 99,85% belum dapat tercapai secara penuh karena pada TW I terdapat penurunan capaian dikarenakan masih terjadi peningkatan pemberitaan negatif secara signifikan mengenai kasus GGAPA.

Pada Triwulan 2 hingga 4 Tahun 2023, tren kenaikan pemberitaan positif dan netral BPOM terjadi secara konsisten dengan dilakukannya amplifikasi kegiatan-kegiatan yang diadakan BPOM secara lebih masif sehingga pemberitaan positif mengenai BPOM terus meningkat.

Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan tujuan untuk menjaga secara konsisten pencapaian di akhir tahun. Cara yang dilakukan yaitu memantau pemberitaan tentang BPOM yang banyak beredar di berbagai media agar tetap didominasi dengan tonasi positif dan netral pada setiap triwulannya.

Kualitas pemberitaan ini dihitung dengan indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM, yakni pemberitaan terkait BPOM di berbagai media baik media cetak, elektronik, dan media *online* yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tonasi positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita

dengan tonasi netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan BPOM saja. Selanjutnya terdapat berita dengan tonasi negatif, yakni berita terkait BPOM yang mengkritik atau menyudutkan BPOM, baik dari kinerja, pelayanan, atau kebijakan BPOM, namun tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari BPOM.

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tonasi positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%.

Sampai dengan triwulan 4 tahun 2023, pemberitaan terkait obat dan makanan secara umum dan BPOM sebanyak 24.692 pemberitaan, yang terdiri dari 53,89% berita bertonasi positif (13.305 berita), 45,36% bertonasi netral (11.201 berita), dan 0,75% bertonasi negatif (186 berita).

Pada Januari 2023, pemberitaan didominasi oleh berita mengenai Kementerian Kesehatan yang akan memulai vaksinasi *booster* kedua untuk masyarakat umum. Topik terkait sirup obat juga dibicarakan yakni mencakup Bareskrim POLRI terus kembangkan penyelidikan mengenai produsen yang diduga melakukan pelanggaran pada produksi sirup obat.

Selanjutnya pada bulan Februari, pemberitaan didominasi oleh Konferensi Pers BPOM mengenai Langkah Antisipatif BPOM Terhadap Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak pada tanggal 8 Februari 2023 yang menunjukkan hasil pengujian BPOM pada sejumlah sirup obat Praxion masih aman digunakan.

Lalu pada bulan terakhir di TW 1 ini, topik pemberitaan yakni seputar kinerja BPOM dalam melakukan penggerebekan sebuah pabrik yang diduga memproduksi kosmetik dan produk kecantikan ilegal di kawasan pergudangan Elang Laut Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara.

Pada bulan April, pemberitaan didominasi oleh penjelasan terkait hasil pengawasan produk mi instan asal Indonesia di Taiwan. BPOM menerbitkan penjelasan terkait regulasi Batas Maksimal Residu (BMR) 2-CE melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida. Selain itu, terdapat pemberitaan terkait klarifikasi produsen soal mi instan Taiwan.

Pada bulan Mei, pemberitaan didominasi oleh penerbitan EUA untuk vaksin *booster* Indovac dan pembongkaran kasus obat palsu oleh Polri. Pihak Bio Farma menyatakan

B POM telah memberikan EUA vaksin Indovac untuk vaksin penguat bagi warga berusia 18 tahun ke atas yang mendapat vaksin primer Pfizer. Pemberitaan terkait ini instan Indonesia di Taiwan juga masih muncul pada bulan ini.

Pada bulan Juni, pemberitaan didominasi oleh konferensi pers B POM terkait penindakan obat ilegal. B POM menemukan dan menyita sejumlah barang bukti sediaan farmasi ilegal berupa obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan ilegal yang tidak memiliki izin edar sebanyak 700 item (22.552 buah).

Pada Juli, pemberitaan didominasi oleh B POM menemukan 1.541 produk kosmetik ilegal di seluruh Indonesia. Penelusuran dilakukan sepanjang tahun 2022. Bukan hanya kosmetik, sederet obat ditemukan B POM mengandung bahan kimia obat dan diedarkan tanpa izin. Sepanjang 2022, ada 777 kasus obat tradisional ilegal di Indonesia. Produk tersebut tidak bisa dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya.

Pada Agustus, pemberitaan didominasi oleh konferensi pers Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai). Ditjen Bea Cukai dan B POM menggagalkan pengiriman 430 karton obat tradisional ilegal dengan total berat 5 ton. Kepala B POM katakan obat tradisional yang akan dikirim ke Uzbekistan tersebut mengandung bahan kimia obat.

Pada September, pemberitaan didominasi oleh regulasi *platform e-commerce*. Pemerintah siap mengenakan sanksi keras hingga penutupan izin media sosial yang sekaligus melakukan aktivitas jual beli elektronik karena merugikan sebagian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk produk makanan dan minuman yang harus memiliki sertifikasi halal sedangkan produk kecantikan harus sudah diawasi oleh B POM.

Pada Oktober, pemerintah segera memberlakukan beberapa regulasi yang bertujuan untuk memperketat arus masuk barang impor. Topik ini menjadi pemberitaan terbanyak pada bulan ini. Perubahan dan perbaikan regulasi tersebut akan segera dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga, salah satunya B POM.

Pada November 2023, informasi tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhadap 13 Perwira Tinggi (Pati) Polri, mendominasi pemberitaan. Adapun ke-13 Pati Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat salah satunya Azis Saputra menjadi Brigjen Polri sebagai Direktur Penyidikan Obat dan Makanan B POM.

Topik terbanyak pada Desember 2023 yaitu BPOM menyita ratusan item obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat (BKO) serta kosmetik mengandung bahan berbahaya. Plt. Kepala BPOM L. Rizka Andalusia mengatakan bahwa jumlah obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung BKO yang ditemukan pada periode September 2022 hingga Oktober 2023 mencapai 51 item atau sekitar satu juta pieces, sementara jumlah kosmetik berbahaya mencapai 183 item atau 1,2 juta pieces.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator IKK8 ini antara lain:

- a. BPOM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, *online*, maupun media sosial.
- b. BPOM membangun *agenda setting* yang diampifikasi oleh Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk meningkatkan paparan informasi publik kepada media masyarakat.
- c. BPOM melakukan pelayanan wawancara media agar media mendapatkan informasi dari BPOM dengan baik dan menyampaikan kinerja atau pernyataan dari BPOM.
- d. BPOM melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media termasuk pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

3.5.2. IKK 9: Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|---|--|--------|-----------|---------|---------------------------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | b | c | d | a | b | c | d |
| Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | 79 | 79,85 | 101,08% | 405.639 | 403.757 | 99,54% |

Realisasi Indikator kinerja “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” pada Tahun 2023 adalah 79,85% dari target 79%, sehingga capaian indikator adalah 101,08% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 79%, capaian indikator adalah 101,08 % dengan kriteria “Baik” (Hijau).

Penetapan target tahun ini mengacu pada capaian persentase tahun 2022 lalu, yaitu sebesar 76,67%. **Kenaikan capaian di tahun 2023 ini menunjukkan telah dilakukannya upaya perbaikan dalam menindaklanjuti permohonan wawancara dari media.** Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik, dan *online*, termasuk *talkshow*. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti merupakan permohonan wawancara yang dipenuhi, baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung dengan Pimpinan BPOM maupun penyampaian jawaban tertulis kepada media.

Cara perhitungan Indikator Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dengan jumlah permohonan wawancara yang masuk dikalikan 100%.

Hingga Triwulan 4 tahun 2023, BPOM telah menerima sebanyak 134 permohonan wawancara dari media. Permohonan ini untuk diajukan untuk keperluan permintaan informasi, narasumber *talkshow*, atau konfirmasi dan penjelasan tertulis terkait isu obat dan makanan. Dari 134 permohonan tersebut, 107 permohonan telah ditindaklanjuti (79,85%) dengan rincian 33 permohonan terpenuhi melalui wawancara langsung dengan narasumber BPOM, 69 permohonan terpenuhi melalui penyampaian jawaban tertulis, dan 5 permohonan terpenuhi melalui pelaksanaan *talkshow*.

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- a. Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada media terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung;
- b. Merespons cepat permohonan informasi dari media secara tertulis dengan mengacu *database* hasil jawaban wawancara yang dimiliki oleh Humas Badan POM; dan

- c. Menyebarkan siaran pers/*press release*, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, konten media sosial ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan informasi publik Badan POM kepada media untuk dapat menjadi acuan jawaban atas pertanyaan media.

3.5.3. IKK 10: Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai *agenda setting*

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|---|---|--------|-----------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | b | c | d | a | b | c | d |
| Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan | Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting | 95,5 | 97,63 | 102,23% | 4.501.138 | 4.453.315 | 98,94% |

Realisasi Indikator kinerja “Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai *agenda setting*” pada Tahun 2023 adalah 97,63% dari target 95,5%, sehingga capaian indikator adalah 102,23% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Adapun pagu anggaran pada IKK10 adalah sebesar Rp4.501.138.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.453.315.574,- atau 98,94%

Penyusunan *agenda setting* publikasi tahun 2023 mengacu pada *agenda setting* pemerintah yang disusun oleh Kantor Staf Presiden dan mempertimbangkan rencana program serta kegiatan strategis BPOM tahun 2023. Untuk melaksanakan *agenda setting* tersebut disusun kalender konten setiap bulannya dengan melibatkan tim pelaksana media sosial BPOM. Kalender konten publikasi terdiri dari beberapa pilar konten antara lain konten kinerja, konten pelayanan publik, konten *greeting*, konten edukasi, dan konten santai/*trivia*.

Cara perhitungan indikator persentase publikasi kinerja Badan POM sesuai *agenda setting* adalah dengan membandingkan antara jumlah publikasi yang diunggah di *platform* media sosial dengan perencanaan dikalikan 100%. Publikasi adalah pengunggahan materi baik berupa foto, infografis, motion grafis, videografis ke berbagai akun resmi *platform* media sosial BPOM (Instagram, fanpage Facebook, Youtube, Twitter). Sedangkan *agenda setting* adalah perencanaan materi publikasi

berdasarkan pemetaan isu obat dan makanan yang disusun tahunan, bulanan, dan mingguan.

Selama tahun 2023, realisasi publikasi yang telah dilakukan BPOM, yaitu sebanyak 288 publikasi terdiri dari 59 publikasi dalam bentuk *greetings* dan 229 publikasi terkait tematik kinerja/edukasi.

Koordinasi dan kerja sama yang baik di dalam tim pelaksana media sosial BPOM sangat mendukung tercapainya target indikator tersebut. Selain itu adanya *brainstorming* dengan tim pelaksana media sosial BPOM untuk menyusun kalender konten publikasi setiap bulannya juga menentukan keberhasilan pencapaian target. Pelaksanaan *agenda setting* yang diampifikasi oleh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) dapat meningkatkan paparan informasi publik kepada media dan masyarakat..

3.6 Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal

| | |
|--|-------------------------------------|
| SK6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal | |
| IKK 11 | Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas |

3.6.1 IKK 11: Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|---|-------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | b | c | d | a | b | c | d |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal | Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas | 82 | 83,97 | 102,40% | 274.185 | 271.993 | 99,20% |

Sasaran Kegiatan ke-6 adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal” diwujudkan dengan nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dicapai oleh Biro Kerja Sama dan Humas. Dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi

Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Realisasi Indikator kinerja yang kesebelas, yaitu “Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas” pada Tahun 2023 adalah 83,97% dari target sebesar 82%, sehingga capaian indikator adalah 102,40% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Penetapan *roadmap* pelaksanaan reformasi birokrasi harus secara konsisten dilaksanakan dan dipantau penerapannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai kegiatan yang mendukung konsisten penerapan RB di 8 (delapan) area tersebut, diantaranya melalui:

- a. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi seluruh area perubahan di lingkup Biro Kerja Sama dan Humas tahun 2023.
- b. Meningkatkan internalisasi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kekinian.
- c. Pemeliharaan dan peningkatan Quality Management System.
- d. Pelaksanaan *Sharing Session* berbagai informasi.
- e. Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Utama dari hasil LKE tahun sebelumnya sebagai bentuk perbaikan dari tahun sebelumnya.

1) Pemeliharaan dan peningkatan *Quality Management System*

a. Audit Internal QMS ISO 9001:2015

Audit internal merupakan suatu keharusan yang dilakukan dalam rangka penerapan implementasi sistem mutu. Pada audit internal akan diukur sejauh mana SOP dan instruksi kerja yang dijalankan dan mampu mencapai hasil yang diinginkan dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan proses. Dalam rangka memperbaiki kelemahan proses, Biro Kerja Sama dan Humas dituntut selalu melakukan *continuous improvement* dan mengkaji dokumen system mutu/instruksi kerja yang telah diterapkan secara berkala.

Audit internal QMS ISO 9001:2015 tahun 2023 dilakukan oleh auditor internal BPOM pada tanggal 7 Juni 2023 dengan hasil 1 AFI (Saran Perbaikan) dan 8 Aspek Positif, sebagai berikut:

i. Area for Improvement (AFI)

Pada POM SOP-08.02/CFM.01/SOP.02 terdapat aktivitas Publikasi Kegiatan Strategis BPOM namun belum terdapat pedoman tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial yang telah ditetapkan pimpinan (masih dalam bentuk draft Pedoman Pengelolaan Media Sosial).

ii. Positif Aspek

1. Penghargaan PRIA 2023 Kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online Tahun 2022
2. Pemenang Anugerah IPRAHUMAS 2022 Kategori Lembaga Terbaik
3. Penghargaan Anugerah Mitra Kerja Sama Pendukung Program Diktiristek Kategori Lembaga Instansi Pemerintah
4. Apresiasi oleh Expert dari lembaga Programma Uitzending Managers Belanda
5. Program Learning Visit Departemen of Druga Administration Nepal ke BPOM
6. Kepala BPOM berbagi pengalaman tentang memimpin dan berkolaborasi dalam penanganan pandemi pada Guest Lecture Harvard Medical School, AS
7. Pemenang the 1st Indonesia GPR kategori Lembaga Humas Pemerintah terbaik, sub kategori Lembaga
8. Apresiasi dari WHO kepada BPOM Yang telah melakukan penanganan EG GED

b. Audit Eksternal dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015

Untuk mengetahui apakah Sistem manajemen mutu (QMS) sudah berjalan baik sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan terhadap persyaratan tertentu perlu dilakukan audit oleh pihak eksternal.

Audit Eksternal dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015 tahun 2023 dilakukan oleh Tim SUCOFINDO tanggal 30-31 Agustus 2023 dengan menyatakan bahwa tidak diterbitkan temuan baik minor, major maupun observasi. Selain itu, terdapat 11 (sebelas) Aspek Positif. Dengan hasil tersebut,

Tim Auditor merekomendasikan kembali terbitnya Sertifikat ISO 9001:2015 kepada Biro Kerja Sama dan Humas.

c. Internalisasi Reformasi Birokrasi

Internalisasi Reformasi Birokrasi di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dilaksanakan melalui program Agen Perubahan, yakni RB Talk 2.0, RB Competition, dan Ria BerRB sehingga dapat menarik minat para pegawai dan bersifat kekinian dengan topik, kuis, dan reward secara berkala. Pelaksanaan kegiatan internalisasi Reformasi Birokrasi (RB), *core value* BerAKHLAK, serta nilai PIKKIR telah dilaksanakan pada:

1) Pelaksanaan RB Talk 2.0 (13 April 2023)

Kegiatan RB Talk 2.0 dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023 dan dihadiri oleh seluruh pegawai Biro KSHM.

- a) Agenda pertama dalam RB Talk ini adalah Internalisasi Gerakan BerAKHLAK yang disampaikan oleh Ratna Wulansari, S.Farm selaku AoC Biro KSHM.
- b) Agenda kedua dalam RB Talk ini adalah paparan dan penyampaian informasi Benturan Kepentingan dari Bu Diah selaku Koordinator Tim RB Pokja Bidang Penguatan Pengawasan terkait.

Setelah agenda kedua, diadakan Quiz sebagai salah satu bentuk evaluasi dari paparan dan informasi yang telah diberikan pada hari tersebut. Agenda ini sekaligus menjadi penutup bagi acara RB Talk ini.





2) Pelaksanaan RB Competition (13 April 2023)

RB Competition diadakan untuk mendukung nilai Harmonis dan Kolaboratif. Pada kegiatan RB Competition ini, pegawai Biro Kerja Sama dan Humas dibagi ke dalam 3 kelompok kemudian diberikan quiz. Quiz ini membutuhkan kerja sama para anggota tim, sehingga nilai kolaboratif perlu ditunjukkan oleh setiap tim.



3) Pelaksanaan RB Talk 2.0 (9 Juni 2023)

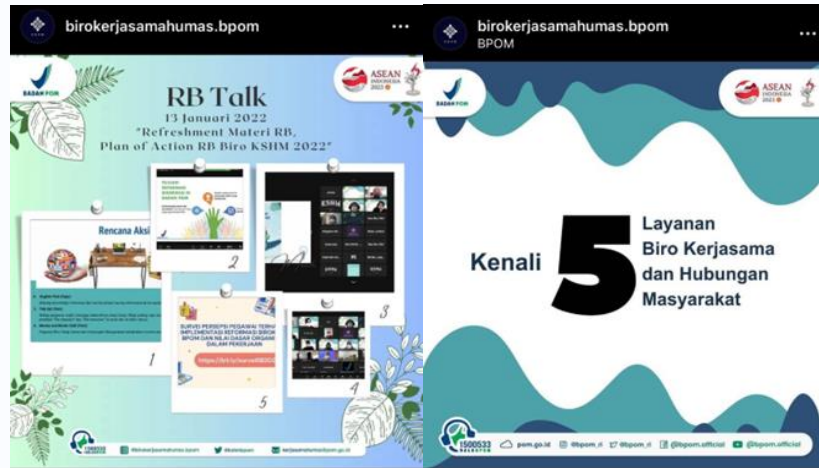
Kegiatan RB Talk 2.0 dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023 dan dihadiri oleh seluruh pegawai Biro KSHM. RB talk ini mengangkat tema Sosialisasi Perubahan Road Map RB BPOM Tahun 2020 – 2024. Pada sosialisasi tersebut ditekankan bahwa terdapat Road Map RB Tematik dengan tema:

- a) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
- b) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)
- c) Peningkatan Investasi
- d) Pengentasan Kemiskinan
- e) Pengendalian Inflasi



4) Pelaksanaan Ria BerRB (April, Mei, Juni, Agustus Tahun 2023)

Ria BerRB merupakan kegiatan pengelolaan media sosial Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk internalisasi RB, budaya organisasi PIKKIR, dan core value ASN BerAKHLAK.



Kendala dan hambatan yang dirasakan antara lain kesulitan penjadwalan yang dapat diikuti oleh semua pegawai, karena terdapat kegiatan pimpinan yang penting, prioritas dan segera, terutama Kelompok Subtansi Hubungan Masyarakat yang harus melekat pada pimpinan.

Pagu kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas, yaitu sebesar Rp. 274.185.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 271.993.109,- (99,20%).

3.7 Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal

SK7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal

| | |
|--------|--|
| IKK 12 | Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas |
|--------|--|

3.7.1. IKK 12: Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|---|--|--------|-----------|---------|---------------------------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | b | c | d | a | b | c | d |
| Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas | 83 | 85,20 | 102,65% | 385.219 | 385.160 | 99,98% |

Realisasi Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas” pada Tahun 2023 adalah 85,20% dari target sebesar 83%, sehingga capaian indikator adalah 102,65% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
- b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
- c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Target Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas tahun 2023 memang sudah memenuhi target dan telah meningkat apabila dibandingkan tahun 2022 yang tidak tercapai. Pada tahun 2022, IP ASN Biro Kerja Sama dan Humas hanya sebesar 78,4, sehingga meningkat sebesar 6,8 poin.

Namun, hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah karena berdasarkan hasil koordinasi dengan Kominfo sebagai Instansi Pembina, JF Prahum Jenjang Muda dan

Madya tidak terdapat Diklat Fungsional yang harus diikuti, sedangkan penilaian IP ASN mensyaratkan setiap JFT untuk sudah melaksanakan Diklat Fungsional. Hal tersebut membuat nilai IP ASN di Biro Kerja Sama dan Humas belum bisa maksimal walaupun sudah mencapai target.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator IP ASN di Biro Kerja Sama dan Humas antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Kursus Bahasa Inggris, dll.
2. Mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain: e-Learning Pejabat Pembuat Komitmen, Sosialisasi Kearsipan, Bimbingan Teknis JFT Pranata Humas, Diklat teknis penyusunan kajian PFM, dll.
3. Penyelenggaraan Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) dan Meet The Expert.
4. Penyelenggaraan *Team Building* Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
5. Seminar *Capacity Building*, dll.
6. Peningkatan kompetensi pegawai menggunakan aplikasi IDEAS.

Pengembangan kompetensi pegawai sangat diperlukan dalam sebuah organisasi karena dengan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawainya. Biro Kerja Sama dan Humas secara konsisten terus berkomitmen dengan penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen kepegawaian serta secara konsisten mendukung pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPOM guna peningkatan kinerja organisasi.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN Badan POM pada Tahun 2024 antara lain meningkatkan nilai dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

Kegiatan-kegiatan di atas diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Humas. Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp. 385.219.000,- (100%) dari alokasi anggaran Rp. 385.160.270,-



3.8 Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas

SK8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas

IKK 13 Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas

3.8.1 IKK 13: Indeks pengelolaan data dan informasi

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|--|---------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | b | c | d | a | b | c | d |
| Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas | Indeks pengelolaan data dan informasi | 2,5 | 3 | 120% | 2.680 | 2.680 | 100% |

Realisasi Indikator kinerja “Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah **3** dari target sebesar **2,5**, sehingga capaian indikator adalah **120%** dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Target triwulanan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan indeks pengelolaan data dan informasi Sektama tetap optimal sepanjang tahun.

Penilaian capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Yang Optimal dihitung secara kumulatif dari Januari hingga Desember sehingga upaya perolehan nilai seharusnya dilakukan sejak awal tahun berjalan.

Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas pada tahun 2023 diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Pemanfaatan *e-mail corporate* BPOM;
- Pemutakhiran data di BPOM *Command Center* (BOC);
- Pemanfaatan sistem informasi BOC melalui akun Kepala Biro Kerja Sama dan Humas.

Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp. 2.680.000,- (100%) dari alokasi anggaran yang ditetapkan.

Capaian indikator ini sudah melampaui target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pegawai Biro Kerja Sama dan Humas telah memanfaatkan secara optimal *email corporate* - pom.go.id
- b. Biro Kerja Sama dan Humas rutin memverifikasi data pada BOC;
- c. Biro Kerja Sama dan Humas rutin memanfaatkan data pada BOC;
- d. Membuat infografis secara rutin untuk mengingatkan pegawai dan disebarakan melalui *whatsapp group* Biro.

3.9 Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel

SK9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel

IKK 14 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas

3.9.1. IKK 14: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas

| Sasaran Kegiatan | Indikator | Volume | | | Anggaran per IKK (dalam ribuan) | | |
|--|---|--------------|---------------|---------|---------------------------------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Target | Realisasi |
| a | b | c | d | a | b | c | d |
| Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas | 90 (efisien) | 100 (efisien) | 111,11% | 8.509 | 8.509 | 100% |

Realisasi Indikator kinerja “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah **100** dari target Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 90, sehingga capaian indikator adalah **111,11%** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi” (Hijau)**.

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Cara perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama adalah berdasarkan range, yaitu **0 - 0,2: 100% (Efisien)**; **0,21 - 0,4: 95% (Efisien)**; **0,41 - 0,6: 92% (Efisien)**; **0,61 - 0,8: 90% (Efisien)**; **0,81 - 1,0: 88% (Efisien)**; 1,01 - 1,2: 86% (Tidak Efisien); 1,21 - 1,4: 84% (Tidak Efisien); 1,41 - 1,6: 80% (Tidak Efisien); 1,61 - 1,8: 78% (Tidak Efisien); > 1,81 dan <0: 75% (Tidak Efisien).

Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Biro Kerja Sama dan Humas, diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Tabel hasil perhitungan menunjukkan bahwa Tingkat Efektifitas penggunaan anggaran sebesar **0,04** sehingga apabila dikonversikan menjadi capaian masuk pada kategori **Efisien** dengan nilai **100**.
- b. Seluruh indikator kinerja kegiatan sudah efisien, terlihat dari realisasi indikator maupun anggaran yang seluruhnya hampir mencapai nilai 100%.

Mempertimbangkan hal di atas, beberapa upaya yang akan terus dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Humas untuk mempertahankan capaian indikator di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan yang dilakukan per triwulan dan disesuaikan dengan perencanaan;
2. Percepatan proses pertanggungjawaban keuangan;
3. Percepatan kegiatan sesuai dengan *Plan of Action*.
4. Melakukan evaluasi dan perbaikan untuk indikator yang belum tercapai targetnya di tahun 2023 agar tidak terulang di tahun 2024.
5. Memberikan pemahaman terkait target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 agar dapat menentukan strategi pencapaiannya kepada seluruh pegawai.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2023, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan tugas koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa fokus kepada dukungan visi dan misi BPOM serta penerapan *core value* ASN dan budaya organisasi PIKKIR.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, telah ditetapkan sasaran, indikator serta target kinerja yang terdiri dari 9 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan. Secara umum, pencapaian kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebesar 104,29% dengan kriteria “Baik”.

4.2. Saran

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus meningkatkan kinerja serta pelayanan dukungan manajemen BPOM. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat antara lain:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan yang SMART dan *applicable*;
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran;
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi, infomasi, dan digital dalam memberikan pelaksanaan tugas pemerintahan berbasis teknologi;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
5. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* bagi pegawai secara rutin/berkelanjutan dan mendokumentasikan proses pemberian *reward* dan *punishment* dengan tertib; dan
6. Peningkatan kompetensi SDM yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai..

2023

LAPORAN TAHUNAN

BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT